



# DINAS PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Jl. K.H.Ahmad Dahlan Komp.TPI Bonehalang Benteng-Selayar  
Kode Pos 92812, Sulawesi Selatan Telepon (0414) 21063, Faximile (0414)  
21063

Website : <https://dkp.kepulauanselayarkab.go.id>

## LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

# LAKIP 2021



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 dapat kami selesaikan. Penyusunan LAKIP Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berkaitan dengan fungsi LAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja kepada para stakeholders maka informasi kinerja yang diungkapkan tidak terbatas pada sasaran yang capaian kinerjanya memenuhi target yang ditetapkan, tetapi juga meliputi informasi kinerja dari sasaran yang tidak memenuhi target yang ditetapkan berikut penjelasan-penjelasanannya. Selanjutnya guna memenuhi fungsi LAKIP sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, maka informasi yang disajikan dalam LAKIP juga meliputi analisis lanjutan dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan penting guna perbaikan kinerja pada masa-masa berikutnya guna mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu : “Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural” sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar periode Tahun 2016 - 2021.

Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas partisipasi, dukungan, dan bantuannya dalam pelaksanaan kegiatan maupun penyusunan laporan ini. Semoga LAKIP ini berguna bagi kita semua dan dapat memberi sumbangsih yang berarti bagi pembangunan bidang perikanan dan kelautan.

  
**KEPALA DINAS**  
**Ir. Makkawaru**  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP. 19630120 198910 1 003

## IKHTISAR EKSEKUTIF



Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar tengah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-

kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LAKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Dinas Perikanan dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2021 merupakan tahun kelima dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator kinerja sasaran menunjukkan selain keberhasilan juga memiliki kekurangan sebagai tantangan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, ditetapkan 7 sasaran dengan 11 indikator sasaran dan mengacu pada 4 misi dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 – 2021. Dari 11 indikator sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, terdapat 5 indikator yang berhasil mencapai target dan 5 indikator sasaran yang belum mencapai target sasaran, sementara 1 indikator sasaran lainnya belum dapat diukur karena tidak tersedianya data.

Seiring dengan tuntutan pembangunan dan tata kelola pemerintahan, upaya perbaikan kinerja Dinas Perikanan akan terus dimaksimalkan di waktu mendatang melalui koordinasi dan kerjasama yang baik.

**KEPALA DINAS**  
  
**Ir. Makkawaru**  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP. 19630120 198910 1 003

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah .....	3
1.4 Isu-Isu Strategis.....	13
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>15</b>
2.1 Rencana Strategis .....	15
2.2 Rencana Kerja Tahunan .....	23
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	27
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>34</b>
3.1 Pengukuran Kinerja.....	34
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	40
3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1 .....	40
3.2.2 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2 .....	42
3.2.3 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3 .....	45
3.2.4 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4.....	46
3.2.5 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-5.....	48
3.2.6 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-6.....	52
3.2.7 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-7.....	55
3.3 Realisasi Keuangan .....	67
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
4.1 Kesimpulan .....	72
4.2 Tindak Lanjut.....	73
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 01. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perikanan .....	17
Tabel 02. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2021. ....	21
Tabel 03. Rencana Kerja Tahunan Dinas Perikanan Tahun 2021 .....	24
Tabel 04. Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2021 .....	28
Tabel 05. Skala Nilai Peringkat Kinerja Dinas Perikanan .....	34
Tabel 06. Indikator Kinerja Sasaran dan Metode Pengukuran Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2021 .....	35
Tabel 07. Capaian Kinerja Dinas Perikanan Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 .....	38
Tabel 08. Pengukuran Capaian pada Indikator Kinerja Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan.....	40
Tabel 09. Analisis Program, Kegiatan, dan Anggaran yang Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja Hasil Evaluasi AKIP .....	42
Tabel 10. Pengukuran Capaian pada Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD).....	43
Tabel 11. Perbandingan antara target dan realisasi nilai EKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 - 2020.....	43
Tabel 12. Analisis Program, Kegiatan, dan Anggaran yang Menunjang Pencapaian Sasaran Nilai Pemerintah Daerah yang Efektif dan Efisien”, dengan indikator nilai EKPD .....	44
Tabel 13. Program, Kegiatan, dan Anggaran yang Menunjang Pencapaian Indikator Berkurangnya Jumlah Rumah Tangga Miskin Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan .....	46
Tabel 14. Pengukuran Capaian pada Indikator Kinerja Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) Tahun 2021 .....	47
Tabel 15. Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) Tahun 2016 - 2021....	47
Tabel 16. Program, Kegiatan, dan Anggaran yang Menunjang Pencapaian Indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) Tahun 2021 .....	48
Tabel 17. Pengukuran Capaian pada Indikator Kinerja Nilai PDRB Subsektor Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021.....	49
Tabel 18. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Indikator Nilai PDRB Subsektor Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Kep. Selayar Tahun 2015 – 2021 .....	49
Tabel 19. Perbandingan Persentasi Distribusi PDRB Berdasarkan Harga Berlaku Nilai PDRB Subsektor Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2021 .....	50

## Laporan Akuntalibitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021

Tabel 20. Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Dasar Harga Konstan Tahun 2016 – 2021 .....	51
Tabel 21. Capaian Kinerja Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) Tahun 2021 .....	52
Tabel 22. Pengukuran Capaian pada Indikator Kinerja Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) Tahun 2021 .....	54
Tabel 23. Perbandingan antara target dan capaian Indikator Realisasi Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) Selama Periode Renstra .....	54
Tabel 24. Program, Kegiatan, dan Anggaran yang Menunjang Pencapaian Indikator Realisasi Pembangunan KIPT Tahun 2021.....	55
Tabel 25. Data Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Kepulauan Selayar ...	56
Tabel 26. Pengukuran Capaian pada Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021.....	56
Tabel 27. Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Produksi Perikanan Tangkap Dalam Periode RENSTRA .....	57
Tabel 28. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi pada Indikator Cakupan Binaan Kelompok Nelayan Tahun 2021 .....	59
Tabel 29. Target dan Capaian Indikator Produksi Olahan Hasil Perikanan .....	59
Tabel 30. Perbandingan antara Target dan Capaian Indikator Produksi Olahan Hasil Perikanan Dalam Periode RENSTRA.....	60
Tabel 31. Dukungan Program, Kegiatan, dan Anggaran yang Menunjang Sasaran “Bertambahnya Produksi Beberapa Kali Lipat pada Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan”, dengan 3 (tiga) indikator capaian Tahun 2021 .....	61
Tabel 32. Data Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 .....	62
Tabel 33. Pengukuran Capaian pada Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 .....	62
Tabel 34. Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Produksi Perikanan Budidaya Dalam Periode RENSTRA .....	63
Tabel 35. Capaian Indikator Kinerja pada Konsumsi Ikan Tahun 2021.....	65
Tabel 36. Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Konsumsi Ikan Dalam Periode RENSTRA .....	65
Tabel 37. Dukungan Program, Kegiatan, dan Anggaran yang Menunjang Capaian Indikator Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dan Konsumsi Ikan Tahun 2021 .....	66
Tabel 38. Realisasi Belanja APBD Dinas Perikanan Tahun 2021.....	67
Tabel 39. Realisasi Belanja Langsung Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021.....	68

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 01. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar .....	4
Gambar 02. Diagram Perbandingan Antara Target dan Realisasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Dalam Periode RENSTRA	41
Gambar 03. Diagram Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Nilai PDRB Subsektor Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Dalam Periode RENSTRA.....	50
Gambar 04. Diagram Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Produksi Perikanan Tangkap Dalam Periode RENSTRA .....	57
Gambar 05. Diagram Perbandingan Antara Target dan Capaian Indikator Produksi Olahan Hasil Perikanan Dalam Periode RENSTRA .....	61
Gambar 06. Diagram Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Produksi Perikanan Budidaya Dalam Periode RENSTRA.....	63
Gambar 07. Diagram Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Konsumsi Ikan Dalam Periode RENSTRA .....	66

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 01. Uraian Permasalahan Serta Rencana Tindak Lanjut Pada Capaian Kinerja Sasaran Dinas Perikanan Tahun 2021 .....	77
Lampiran 02. Capaian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2021 .....	85
Lampiran 03. Rencana Aksi Dinas Perikanan Tahun 2021 .....	86
Lampiran 04. Evaluasi Rencana Aksi Dinas Perikanan Tahun 2021.....	91
Lampiran 04. Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2021.....	96



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas peran birokrasi pemerintah dalam penyelenggaraan tupoksinya, organisasi pemerintah dituntut untuk semakin transparan dan akuntabel, mampu mempertanggungjawabkan berbagai kebijakan dan tindakan yang dilakukan guna mencapai tujuan birokrasi. Demikian pula perubahan dalam lingkungan global menuntut agar manajemen sektor publik dikelola berdasarkan prinsip *Good Governance* dan *Performance Management*.

*Good Governance* adalah strategi untuk menciptakan institusi masyarakat yang kuat, dan juga untuk membuat pemerintah/publik sektor semakin terbuka, responsif, akuntabel dan demokratis. *Good governance* tidak hanya terkait dengan efisiensi, tapi juga berkaitan dengan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan kepentingan publik kepada stakeholdernya. Ide dasar dari akuntabilitas adalah kemampuan organisasi atau penerima amanat untuk memberikan jawaban kepada pihak yang memberikan amanat atau mandat tersebut.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan pendorong terwujudnya *good governance*. LAKIP juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik serta digunakan sebagai media akuntabilitas bagi instansi pemerintah. Olehnya itu setiap unit organisasi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan kepada para stakeholder, yang dituangkan melalui LAKIP. Laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi dilakukan melalui tahapan antara lain penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja. Di dalam kerangka akuntabilitas kinerja adalah alat pendorong terwujudnya *good governance* dan dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diberi amanah dalam menyelenggarakan urusan bidang kelautan dan perikanan. Pembentukan Dinas Perikanan sebagai Organisasi Perangkat Daerah pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar diikuti dengan pemberian kewenangan dan tanggung jawab dalam pengembangan bidang kelautan dan perikanan. Dengan amanah tersebut, Dinas Perikanan secara periodik mempunyai kewajiban untuk melakukan pelaporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban terhadap amanat tersebut.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan dan penyampaian LAKIP Dinas Perikanan adalah untuk mewujudkan akuntabilitas dinas kepada Bupati yang memberi mandat. Dengan demikian LAKIP merupakan sarana bagi dinas untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.

Adapun penyusunan LAKIP ini ditujukan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun 2021. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan

kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

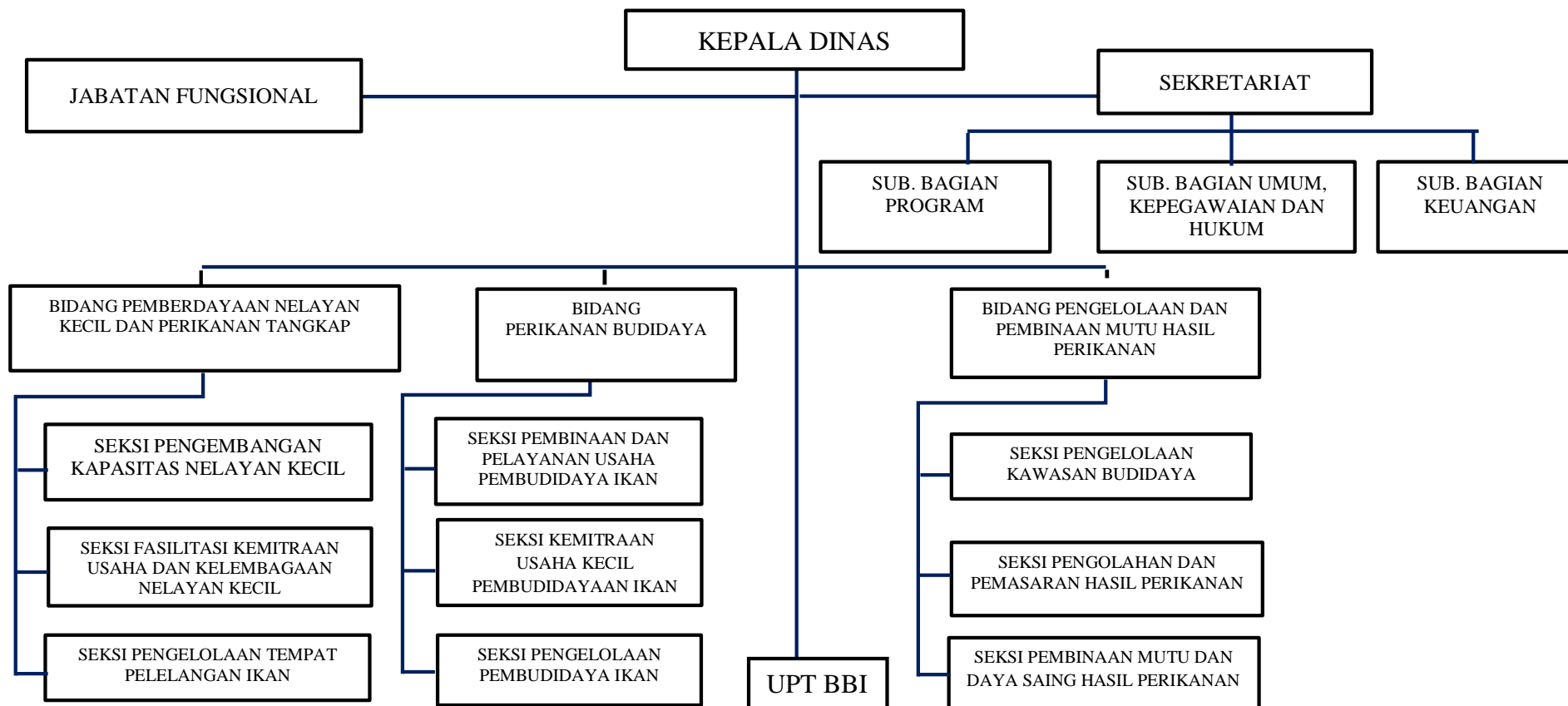
### **1.3 Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah**

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar No. 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar membentuk Dinas Perikanan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mengemban tugas membangun dan mengembangkan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kedudukan Dinas Perikanan dalam Peraturan Daerah ini adalah merupakan pelaksana Pemerintah Daerah menurut bidangnya yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **1.3.1 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan, maka Struktur Organisasi Dinas Perikanan adalah sebagai berikut :

**GAMBAR 01.  
STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



### 1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Kepala Dinas Perikanan adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas Perikanan Kabupaten Selayar adalah sebagai berikut :

#### a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan di bidang Kelautan dan Perikanan sesuai kebijakan Bupati dengan memperhatikan petunjuk/pedoman teknis Menteri Kelautan dan Perikanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.;
2. Menyusun rencana kegiatan Dinas Perikanan sebagaimana pedoman dalam pelaksanaan tugas;
3. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
4. Menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.;
5. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
6. Menyelenggarakan administrasi Dinas Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. Menyelenggarakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
8. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya;
9. Memantau, mengawasi dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas, dan
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

**b. Sekretaris Dinas**

Sekretariat adalah unsur pelayanan teknis administrasi di lingkungan Dinas Perikanan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan memberikan pelayanan teknis serta pelayanan administrasi dalam menunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten sesuai fungsi dan kewenangan perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja;
3. Pengoordinasian urusan pengelolaan administrasi keuangan;
4. Pengoordinasian urusan pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah (BMD)
5. Pengoordinasian urusan pengelolaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
6. Pengoordinasian urusan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
7. Pengoordinasian urusan pengelolaan pendapatan daerah sesuai kewenangan Perangkat Daerah;
8. Pengoordinasian urusan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
9. Pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
10. Pengoordinasian urusan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan
11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Susunan organisasi sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Sub Bagian Program
3. Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Perikanan Tangkap

Bidang Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan TPI dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis koordinasinya melalui Sekretaris. Secara umum Kepala Bidang Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan TPI mempunyai fungsi membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan evaluasi, pelaporan, dan administrasi di bidang Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan TPI.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan TPI mempunyai tugas pokok :

1. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan TPI dalam lingkup kewenangan kabupaten sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi serta pelaporan Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan TPI.;
2. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pengembangan kapasitas nelayan kecil dalam daerah kabupaten;
3. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan Fasilitasi kemitraan Usaha dan kelembagaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten;



4. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan; dan
5. Mendistribusikan dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan tugas;
6. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
7. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan TPI dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya..

Susunan organisasi bidang pemberdayaan nelayan kecil dan perikanan tangkap terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
2. Seksi Fasilitasi Kemitraan Usaha dan Kelembagaan Nelayan Kecil
3. Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

d. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis koordinasinya melalui Sekretaris. Secara umum Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan,

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan evaluasi, pelaporan, dan administrasi di Bidang Perikanan Budidaya.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok :

1. menyusun rencana program dan kegiatan pengelolaan perikanan budidaya dalam lingkup kewenangan kabupaten sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Melakukan fasilitasi, koordinasi, dan pelayanan pendaftaran usaha pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
3. Melakukan kegiatan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil;
4. Melakukan kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan;
5. Melakukan pembinaan usaha pembudidayaan ikan kecil;
6. Melakukan pengawasan usaha pembudidayaan ikan yang dapat diusahakan dalam kabupaten;
7. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
8. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perikanan Budidaya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
9. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya.
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, dan
11. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan organisasi bidang pembedayaan usaha kecil pembudidaya ikan terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan dan Pelayanan Usaha Pembudidaya Ikan
2. Seksi Kemitraan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan
3. Seksi Pengelolaan Pembudidaya Ikan

e. Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan

Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang secara teknis koordinasinya melalui Sekretaris. Secara umum Kepala Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan mempunyai fungsi membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan evaluasi, pelaporan, dan administrasi di Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas pokok :

1. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. Melaksanakan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha Pengolahan dan pemasaran Hasil Perikanan dalam lingkup kewenangan kabupaten;
2. Melaksanakan penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;

3. Melaksanakan pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil;
4. Melaksanakan fasilitasi bahan verifikasi dan kajian untuk pelayanan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil;
5. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
6. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
7. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
8. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
9. Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan;
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, dan
11. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan organisasi bidang Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan terdiri dari :

1. Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya;
2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
3. Seksi Pembinaan Mutu dan Daya Saing Hasil Perikanan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

UPT Dinas adalah unsur pelaksana operasional dinas yang dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang penyediaan bahan pembinaan dan koordinasi kegiatan bina usaha hasil produksi perikanan.

#### 1.4 Isu-Isu Strategis

Pembangunan saat ini telah menuntun masyarakat menjadi semakin kritis dalam menyikapi kinerja pelayanan pemerintah, sehingga setiap unit organisasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan, baik lokal, regional maupun tingkat nasional. Memperhatikan perkembangan masyarakat dari tahun ke tahun selalu ada isu-isu dan permasalahan yang kompleks, dan perlu disikapi oleh Pemerintahan secara lebih bijak dan terarah, sehingga pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk menghadapi berbagai isu dan permasalahan yang ada, perlu diantisipasi melalui perencanaan yang matang dan komprehensif, sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan.

Menyikapi isu-isu dan permasalahan di Kabupaten Kepulauan Selayar, terutama masalah Pelayanan perlu diarahkan pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju tata pemerintahan yang baik dan bersih sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah yang dihadapi pada sector kelautan dan perikanan, perlu disikapi dengan mengacu pada kebijakan dan arah pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Beberapa isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Ketersebaran dan luasnya jangkauan pelayanan pada masyarakat pelaku utama perikanan serta karakteristik wilayah penangkapan yang terbuka.
2. Produktifitas masyarakat pelaku utama perikanan relatif masih rendah yang ditandai dengan skala usaha bersifat tradisional dan kepemilikan sarana usaha yang kecil.
3. Tingkat kesejahteraan dan kualitas pelaku utama perikanan yang rendah.
4. Masih maraknya kegiatan penangkapan ikan secara illegal dan lemahnya koordinasi lintas instansi dalam penegakan hukum.
5. Terbatasnya infrastruktur perikanan yang mengkoneksikan aktifitas usaha perikanan (hulu-hilir) secara terintegrasi, baik antara wilayah/sentra perikanan maupun antara jenis usaha perikanan.
6. Masih lemahnya penataan kelembagaan pelaku utama perikanan dan rendahnya skala kerjasama dengan pelaku usaha lainnya.
7. Masih lemahnya sistem informasi kelautan dan perikanan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis**

Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2021 adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kab. Kepulauan Selayar selama kurun waktu dengan lima tahun ke depan yaitu tahun 2016 – 2021, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2021 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijaksanaan operasional bagi seluruh aparat Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program maupun kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang, dengan demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.

Dinas Perikanan mengadopsi Visi pembangunan kabupaten Kepulauan Selayar periode lima tahun kedepan. Visi tersebut adalah *“Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural”*. Dalam rumusan visi ini terdapat 3 (tiga) pokok visi yakni *“masyarakat maritime sejahtera”*, *“nilai keagamaan”* dan *“nilai kultural”*. *“Masyarakat maritim yang*

*sejahtera*” adalah perwujudan visi yang hendak dicapai, “*nilai keagamaan*” dan “*nilai kultural*” adalah landasan nilai yang dijadikan acuan dalam pencapaian perwujudan visi kesejahteraan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2016 – 2021, merumuskan 7 (tujuh) misi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Nilai Keagamaan Sebagai Sumber Inspirasi Dan Basis Nilai Utama Dalam Pembangunan Secara Terencana, Menyeluruh dan Berkelanjutan.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Dan Baik Melalui Pendekatan Aspiratif, Partisipatif dan Transparan.
3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat.
4. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi Swasta di Sektor Perikanan, Kelautan dan Pariwisata.
5. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Sesuai Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Daerah.
6. Mewujudkan peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta sentra pertumbuhan di sektor agrobisnis dan agromaritim yang berbasis pada ekonomi kerakyatan.
7. Mewujudkan Pelestarian Tradisi dan Kearifan Lokal Melalui Strategi Kebudayaan.

Bertitik tolak dari tujuh (7) misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, terdapat empat (4) misi yang didukung oleh pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu :



Tabel 01.  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perikanan  
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021

<b>Visi : Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural</b>				
<b>Misi ke-II : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik Melalui Pendekatan Aspiratif, Partisipatif dan Transparan</b>				
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>	<b>Program</b>
Memperkuat struktur dan budaya organisasi serta profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (T-2)	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel (S-2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kemampuan dan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah;</li> <li>Meningkatkan kualitas koordinasi penyelenggaraan program lintas sector;</li> <li>Meningkatkan kualitas manajemen aparatur pemerintah daerah termasuk di dalamnya penerapan <i>punishment dan reward</i></li> </ul>	Penguatan kelembagaan pemerintah daerah;  Peningkatan kinerja penyelenggaraan program pembangunan daerah;  Penerapan manajemen aparatur sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis <i>merit system</i>	Pelayanan administrasi perkantoran;  Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;  Peningkatan kesejahteraan pegawai;  Peningkatan kapasitas SDM Aparatur;  Peningkatan sumberdaya manusia;  Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan;  Pengembangan system perencanaan dan evaluasi capaian kinerja;  Pengembangan Data dan Informasi
	Meningkatnya kualitas pemerintah daerah yang efektif dan efisien (S-3)			

<b>Misi III : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat</b>				
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>	<b>Program</b>
Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan (T-6)	Berkurangnya penduduk miskin (S-8)	Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap sumber-sumber ekonomi;	Pembinaan dan peningkatan keberdayaan penduduk miskin;	Pemberdayaan pembudidaya ikan; Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
	Meningkatnya daya beli masyarakat (S-9)	Meningkatkan daya beli masyarakat	Perbaikan income perkapita; Pengendalian harga; Perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan per kapita.	Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan; Pengembangan perikanan tangkap; Pengembangan perikanan budidaya; Pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan; Penguatan kelembagaan masyarakat kelautan dan perikanan.

<b>Misi IV: Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi Swasta di Sektor Perikanan, Kelautan, dan Pariwisata</b>				
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>	<b>Program</b>
Meningkatkan daya saing dan investasi daerah (T-12)	Meningkatnya investasi (S-19)	Meningkatkan minat dan daya investasi	Peningkatan promosi, pemberian kemudahan berinvestasi dan jaminan kepastian hukum bagi investor	Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan; Sarana dan prasarana pesisir dan pulau-pulau kecil; Pencatatan dan perizinan budidaya; Peningkatan daya saing produk perikanan;
<b>Misi ke-V : Mewujudkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Sesuai Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Daerah.</b>				
Meningkatkan posisi tawar dan letak strategis wilayah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kemaritiman (T-13)	Terbangun dan berkembangnya Kawasan Industri Perikanan Terpadu dan pusat budidaya ikan karang (S-21)	Menjadikan sector perikanan sebagai salah satu penggerak utama pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berperan dalam pengembangan kawasan regional secara terpadu	Peningkatan dukungan kerjasama berbagai pihak terkait penyediaan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan industry perikanan terpadu	Pembangunan kawasan industry perikanan terpadu; Penyelenggaraan dan pengelolaan TPI.

<b>Misi ke-V : Mewujudkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Sesuai Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Daerah.</b>				
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>	<b>Program</b>
Bertambahnya produksi beberapa kali lipat pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan (S-23)	Bertambahnya produksi beberapa kali lipat pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan (S-23)	Membangun sentra pengembangan komoditas perikanan dan kelautan	Penguatan kelembagaan nelayan	Pengembangan perikanan tangkap; Peningkatan produksi perikanan tangkap; Pengembangan perikanan budidaya; Pengembangan UPTD Hachery Baloiya/BBI; Peningkatan produksi perikanan budidaya;

Tabel 02.  
Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Dinas Perikanan  
Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Tujuan		Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Sumber Data
1.	Memperkuat struktur dan budaya organisasi serta profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (T-2)	1.	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	1.	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	Hasil Penilaian Inspektorat atas LAKIP Tahun 2020
		2.	Meningkatnya kualitas pemerintah daerah yang efektif dan efisien	2.	Skor Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPD)	Data Berdasarkan nilai EKPD Kabupaten Tahun 2021
2.	Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan (T-6)	3.	Menurunnya angka kemiskinan pada rumah tangga masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	3.	Berkurangnya jumlah Rumah Tangga Miskin pelaku usaha kelautan dan perikanan (KK)	Data Sekunder dari instansi lain
		4.	Meningkatnya daya beli masyarakat	4.	Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Pembudidaya (NTPi)	Data Berdasarkan rilis NTN dan NTPi Propinsi Tahun 2021
3.	Meningkatkan daya saing dan investasi daerah (T-12)	5.	Meningkatnya investasi	5.	Nilai PDRB Sub sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten (Tahun Sebelumnya)	Data Berdasarkan Laporan Selayar Dalam Angka Tahun 2020 (BPS Kabupaten Selayar)

4.	Meningkatkan posisi tawar dan letak strategis wilayah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kemaritiman (T-13)	6.	Terbangun dan berkembangnya Kawasan Industri Perikanan Terpadu dan pusat budidaya ikan karang	6.	Realisasi pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) (%)	Data Berdasarkan jumlah dokumen yang disediakan untuk pembangunan KIPT dikali 100 %
		7.	Bertambahnya produksi beberapa kali lipat pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan	7.	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Data Berdasarkan Kegiatan Statistik Perikanan
				8.	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Data Berdasarkan Kegiatan Statistik Perikanan Tahun 2021
				9.	Jumlah Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)	Data Berdasarkan Kegiatan Statistik Perikanan Tahun 2021
				10.	Konsumsi Ikan (Kg/Org/Tahun)	Data Berdasarkan rilis DKP Propinsi Tahun 2021
				11.	Jumlah Cakupan bina kelompok nelayan	Data berdasarkan jumlah Kelompok yang diberikan bantuan dari DKP Kep. Selayar Tahun 2021

## 2.2 Rencana Kerja Tahunan

Berdasarkan isu permasalahan dan tugas pokok yang diemban oleh Dinas Perikanan, dengan mengacu pada RPJMD dan Renstra OPD, maka Dinas Perikanan tahun 2021 mengimplementasikan melalui Rencana Kerja Tahunan dengan 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 39 (Tiga Puluh Sembilan) Sub Kegiatan.

Program tersebut terdiri atas 1 (Satu) program generik yang bersifat dukungan dan layanan sekretariat dengan 7 (Tujuh) kegiatan dan 3 (Tiga) program teknis dengan 6 (Enam) kegiatan. Adapun program dan kegiatan Dinas Perikanan tahun 2021 terurai di bawah ini dan dapat dilihat pada table berikut ini.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Tabel 03.  
Rencana Kerja Tahunan Dinas Perikanan  
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program/Kegiatan		Anggaran
1.	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	70-80	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b> Kegiatan :		
				1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 441.661.200,00
				2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.668.767.000,00
2.	Meningkatnya kualitas pemerintah daerah yang efektif dan efisien	Skor Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPD)	Sangat Tinggi	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b> Kegiatan :		
				3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 218.572.200,00
				4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 332.766.000,00
				5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 328.978.000,00
				6.	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 489.086.581,00
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 104.704.353,00				



Laporan Akuntalibitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021

3.	Menurunnya angka kemiskinan pada rumah tangga masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	Berkurangnya jumlah Rumah Tangga Miskin pelaku usaha kelautan dan perikanan (KK)	241	8.	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b> Kegiatan : Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 248.932.500,00
4.	Meningkatnya Daya Beli masyarakat	Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Pembudidaya (NTPi)	≥ 103	9.	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b> Kegiatan : Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Rp 215.400.000,00
5.	Meningkatnya Investasi	Nilai PDRB Sub sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten (Rp. Juta)	1.130.295,3	10.	<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b> Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Rp 184.222.000,00
6.	Terbangun dan berkembangnya Kawasan Industri Perikanan Terpadu dan pusat budidaya ikan karang	Realisasi pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (%)	65	11.	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b> Kegiatan : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Rp 635.792.731,00
7.	Bertambahnya produksi beberapa kali lipat pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan	1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	36.938,08	12.	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b> Kegiatan : Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.019.540.870,00
		2. Jumlah Cakupan bina kelompok nelayan	190 KUB			
		3. Jumlah Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)	135			

Laporan Akuntalibitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021

		4. Konsumsi Ikan (Kg/Org/Tahun)	53	13.	<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b> Kegiatan: Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 25.000.000,00
		5. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	961,13	14.	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b> Kegiatan: Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 1.010.901.000,00
Jumlah :						<b>Rp 10,924,274,435,-</b>

#### **2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi serta sumberdaya yang tersedia.

Pada perjanjian kinerja tersebut terdapat 5 sasaran strategis (SS) yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Kepulauan Selayar di Bidang Kelautan dan Perikanan. Untuk setiap Sasaran Strategis yang disusun dan ditetapkan memiliki tolak ukur yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target. Adapun dokumen penetapan kinerja yang dimaksud ditampilkan pada tabel 03. di bawah ini :

Tabel 04.  
Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan  
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	%	70-80	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b> 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA 4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA 5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja

					2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</li> <li>3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</li> <li>4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</li> </ol>
	Meningkatnya kualitas pemerintah daerah yang efektif dan efisien	Skor Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPD)	Skala Predikat	Sangat Tinggi	3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</li> <li>2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</li> </ol>
					4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> </ol>

					5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
							4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
							2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
							3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
					7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
							2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan, Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan
							3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesinnya Lainnya
							4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

	Menurunnya angka kemiskinan pada rumah tangga masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	Berkurangnya jumlah Rumah Tangga Miskin pelaku usaha kelautan dan perikanan	KK	241	8.	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b> Pemberdayaan Nelayan Kecil	1. 2.	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
4.	Meningkatnya Daya Beli masyarakat	Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Pembudidaya (NTPi)	Skor	$\geq 103$	9.	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b> Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	1. 2.	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
5.	Meningkatnya Investasi	Nilai PDRB Sub sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten	Rp. Juta	1.130.295.3	10	<b>Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b> Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	1.	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

6.	Terbangun dan berkembangnya Kawasan Industri Perikanan Terpadu dan pusat budidaya ikan karang	Realisasi pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu	%	65	11	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b> Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1.	Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
7.	Bertambahnya produksi beberapa kali lipat pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan	1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	36.938,08	12	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b> Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
		2. Jumlah Cakupan bina kelompok nelayan	Jumlah KUB	190				
		3. Jumlah Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	135				
		4. Konsumsi Ikan	Kg/org/tahun	53	13	<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b> Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota



		5. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Ton	961.13	14	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>  Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>2. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>3. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>4. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</li> </ol>
--	--	---	-----	--------	----	--	--

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Pengukuran Kinerja

Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021.

Format Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021, diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021.

Tabel 05.  
Skala Nilai Peringkat Kinerja Dinas Perikanan

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah

Tabel 06.  
Indikator Kinerja Sasaran dan Metode Pengukuran Kinerja  
Dinas Perikanan Tahun 2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	METODE PENGUKURAN
1	2	3	4	5
Misi II : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik Melalui Pendekatan Aspiratif, Partisipatif, dan Transparan				
1.	Memperkuat struktur dan budaya organisasi serta profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (T-2)	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel (S-2)	1. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Predikat AKIP SKPD
		Meningkatnya kualitas pemerintah daerah yang efektif dan efisien (S-3)	2. Skor Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPD)	Nilai EKPD Daerah
Misi III : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat				
2.	Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan (T-6)	Menurunnya angka kemiskinan pada rumah tangga masy. pelaku usaha kelautan dan perikanan (S-8)	3. Berkurangnya Jumlah Rumah Tangga (RTP) Miskin Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Jumlah dan % RTP)	$\frac{\text{Jumlah RTP Miskin yang Berkurang}}{\text{Jumlah RTP Miskin Target Daerah}} \times 100 \%$
		Meningkatnya daya beli masyarakat (S-9)	4. Nilai Tukar Belayan (NTN)	$\frac{\text{Nilai yang Diterima Nelayan (Rp)}}{\text{Nilai yang Dibayarkan Nelayan (Rp)}} \times 100 \%$
			5. Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	$\frac{\text{Nilai yg Diterima Pembudidaya (Rp)}}{\text{Nilai yg Dibayarkan Pembudidaya (Rp)}} \times 100 \%$

3.	Meningkatkan daya saing dan investasi daerah (T-12)	Meningkatnya investasi (S-19)	6. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB (Juta)	<u>Nilai PDRB Subsektor Perikanan</u> Nilai PDRB Daerah X 100 %
Misi V : Mewujudkan Pengelolaan Potensi SDA Sesuai Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Daerah				
4.	Meningkatkan posisi tawar dan letak strategis wilayah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kemaritiman (T-13)	Terbangun dan berkembangnya kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang (S-21)	7. Realisasi pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (%)	<u>Jumlah Realisasi Pembangunan KIPT</u> Target Daerah Pembangunan KIPT X 100 %
5.	Meningkatkan posisi tawar dan letak strategis wilayah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kemaritiman (T-13)	Bertambahnya produksi beberapa kali lipat pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan (S-23)	8. Volume Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	<u>Jumlah Produksi Ikan Tangkapan (Ton)</u> Target Daerah (Ton) X 100 %
			9. Volume Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	<u>Jumlah Produksi Ikan Budidaya (Ton)</u> Target Daerah (Ton) X 100 %
			10. Volume Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)	<u>Jumlah Produksi Ikan Olahan (Ton)</u> Target Daerah (Ton) X 100 %
			11. Nilai Konsumsi Ikan (Kg/Org/Tahun)	<u>Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)</u> Target Daerah (Ton) X 100 %
			12. Jumlah Cakupan Bina Kelompok Nelayan (KUB)	<u>Jumlah KUB yang Mendapat Bantuan</u> Jumlah KUB X 100 %

Pengukuran kinerja yang dilaksanakan dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran secara periodik. Pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan dengan berpedoman pada formula perhitungan yang telah ditetapkan dalam informasi kinerja atau evaluasi kinerja. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan di dalam Renstra Dinas Perikanan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan atau evaluasi monitoring realisasi kegiatan dan keuangan pada Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Terdapat 11 indikator kinerja yang diukur dalam 7 (tujuh) sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 berdasarkan Revisi Renstra Dinas Perikanan tahun 2016-2021. Ke-11 indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja utama (IKU).

Berikut ini uraian dan analisis capaian masing-masing indikator kinerja berdasarkan sasaran strategisnya :

Tabel 07.  
Capaian Kinerja Dinas Perikanan  
Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pemerintah Daerah yang Bersih dan Akuntabel	1. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	%	70-80	Nilai LAKIP DKP Tahun 2020 : 56,44	81
2.	Meningkatnya Kualitas Pemerintah Daerah yang Efektif dan Efesien	2. Skor Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD)	Skala Predikat	Sangat Tinggi	Sedang	na.
3.	Menurunnya Angka Kemiskinan pada Rumah Tangga Masyarakat Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	3. Berkurangnya Jumlah Rumah Tangga Miskin Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	KK	241	na.	na.
4.	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	4. Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Pembudidaya (NTPi)	Skor	≥ 103	NTN = 107,43 NTPi = 101,90	NTN = 104,30 NTPi = 98,93
5.	Meningkatnya Investasi	5. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB	Rp. Juta	1.130.295,3	1.739.540,56	154
6.	Terbangun dan Berkembangnya Kawasan Industri Perikanan Terpadu dan Pusat Budidaya Karang	6. Realisasi Pembangunan Sentra Kawasan Industri Perikanan Terpadu	%	65	48	74

7.	Bertambahnya Produksi Beberapa Kali Lipat pada Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan	7.	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	36.938,08	20.883,80	56,54
		8.	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Ton	961,13	522,79	54,39
		9.	Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	135	299,90	222
		10.	Konsumsi Ikan	Kg/org/ Tahun	53	69,1	130
		11.	Cakupan Binaan Kelompok Nelayan (yang diberi bantuan Tahun 2021)	Klpk	190	332	175

### 3.2 Analisis Capaian Kinerja

#### 3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1 : “Meningkatnya Kualitas Pemerintah Daerah yang Bersih dan Akuntabel”

Sasaran Strategis : Meningkatkan Kualitas Pemerintah Daerah yang Bersih dan Akuntabel, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yakni Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan.

Hasil Evaluasi dan penilaian atas LAKIP Dinas Perikanan Tahun 2020 telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten pada tahun 2021. Pencapaian kinerja pada sasaran strategis ini diuraikan berdasarkan hasil penilaian LAKIP Dinas Perikanan yang diuraikan secara periodik selama periode RENSTRA sampai Tahun 2020, diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 08.

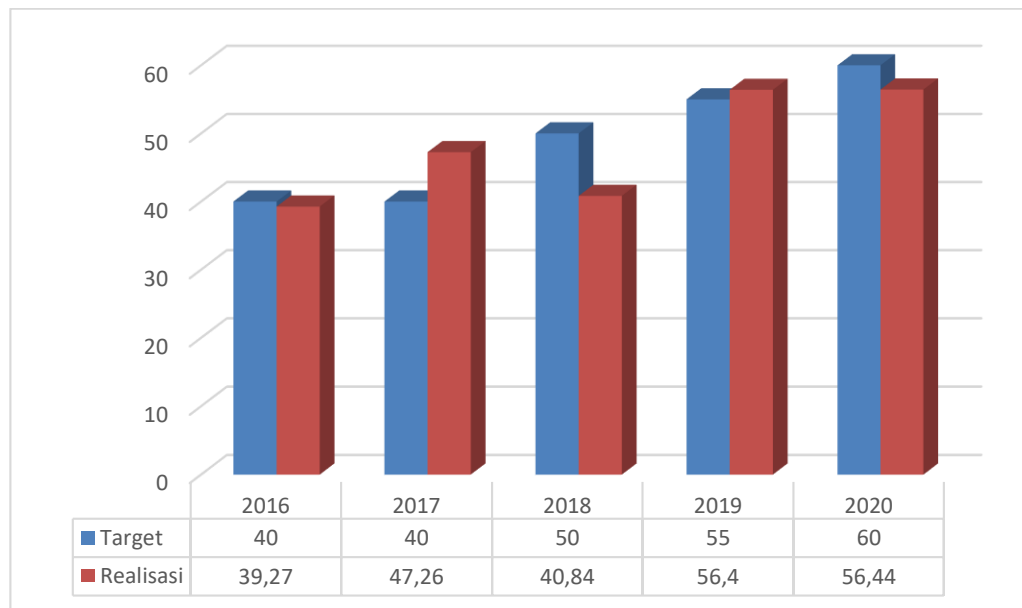
Pengukuran Capaian pada Indikator Kinerja Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pengukuran
1.	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	%	65-70	56,44	81	Tinggi
Sumber : Laporan Penilaian LAKIP DKP Tahun 2020. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2021						



Gambar 02.

Diagram Perbandingan Antara Target dan Realisasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2020



Catatan: \*Nilai LAKIP DKP Tahun 2020 digunakan sebagai capaian kinerja Dinas Perikanan dalam LAKIP Tahun 2021

Capaian kinerja indikator Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 adalah 56,44 dari target 70 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 81 %. Capaian ini jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 0,07%.

Untuk memenuhi ketercapaian target, masih perlu dilakukan pembenahan dan perbaikan pada :

1. Dokumen perencanaan baik tujuan, sasaran strategis, program, dan kegiatan.
2. Beberapa pernyataan dan penetapan Indikator Kinerja yang belum selaras dengan program dan kegiatan sehingga pengukuran kinerja sulit dilaksanakan.
3. Belum dilaksanakannya review dokumen Rencana Strategis Dinas.
4. Membangun kesepahaman dan koordinasi antara unit organisasi dalam menyusun dokumen perencanaan, pengumpulan data dan evaluasi kinerja.

Dalam menunjang pencapaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Pemerintah Daerah yang Bersih dan Akuntabel”, dengan indikator Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja didukung oleh program, kegiatan, dan anggaran pada Dinas Perikanan diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 09.  
Analisis Program, Kegiatan, dan Anggaran yang Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target	Realisasi (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
<b>Sub Kegiatan :</b>				
1.	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	159.055.200,00	6 Dokumen dan 75 peserta	100
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.880.000,00	1 Dokumen	100
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.470.000,00	1 Dokumen	100
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.280.000,00	1 Dokumen	100
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.070.000,00	3 Dokumen	100
6.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	246.396.000,00	24 Laporan	100
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
<b>Sub Kegiatan :</b>				
1.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30.525.000,00	12 Bulan	100
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000,00	1 Dokumen	100
3.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10.000.000,00	1 Dokumen	100

### 3.2.2 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2 : “Meningkatnya Kualitas Pemerintah Daerah yang Efektif dan Efisien”

Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Pemerintah Daerah yang Efektif dan Efisien”, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yakni Skor Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPD). Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD) adalah alat pengukuran manajemen (*management toolkit*) untuk

mengetahui pencapaian kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penilaian EKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 belum dirilis oleh Bappeda, sehingga pengukuran kinerja untuk sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pemerintah Daerah yang Efektif dan Efisien tidak dapat dianalisis.

Tabel 10.  
Pengukuran Capaian pada Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD) Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pengukuran
1.	Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD)	Skala Predikat	Sangat Tinggi	Sedang	Na	-
Sumber : Nilai EKPD Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2020. Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2021						

Tabel 11.  
Perbandingan antara target dan realisasi nilai Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 - 2020

Target Indikator dan Capaian Kinerja Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD)										
Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019*		Tahun 2020*	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Na	Sangat tinggi	Na	Sangat tinggi	Na
*Nilai EKPD Tahun 2020 digunakan sebagai data capaian kinerja Dinas Perikanan dalam LAKIP Tahun 2021										

Dalam menunjang pencapaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Pemerintah Daerah yang Efektif dan Efisien”, dengan indikator nilai Kinerja Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD) didukung oleh program, kegiatan, dan anggaran pada Dinas Perikanan diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 12.

Analisis Program, Kegiatan, dan Anggaran yang Menunjang Pencapaian Sasaran Nilai Pemerintah Daerah yang Efektif dan Efisien”, dengan indikator nilai Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD)

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target	Realisasi (%)
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>				
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
<b>Sub Kegiatan :</b>				
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	157.750.200	22 orang	100
2.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60.822.000	120 orang	100
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
<b>Sub Kegiatan :</b>				
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	8 jenis	100
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000	3 jenis	100
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.525.000	12 bulan	100
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.800.000	12 bulan	100
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	307.441.000	475 kali	100
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
<b>Sub Kegiatan :</b>				
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.578.000	12 unit	100
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	208.400.000	1 unit dan 2 paket	100
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
<b>Sub Kegiatan :</b>				
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.995.000	12 bulan	100
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.674.847	3 tagihan	100
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	364.416.734	83 pegawai	100

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target	Realisasi (%)
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>				
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
<b>Sub Kegiatan :</b>				
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.630.000	1 unit	100
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.550.000	31 unit	100
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.024.353	23 unit	100
4.	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.500.000	1 unit	100

**3.2.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3** : “Menurunnya Angka Kemiskinan pada Rumah Tangga Masyarakat Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan”

Sasaran Strategis ketiga adalah “Menurunnya Angka Kemiskinan pada Rumah Tangga Masyarakat Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan” yang merupakan penjabaran dari Tujuan ke-6 RPJMD, yaitu : Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan. Sasaran Strategis ini diukur dengan indikator berkurangnya jumlah rumah tangga miskin pelaku usaha kelautan dan perikanan (KK). Namun demikian instrumen dan metode pengumpulan data dan pengukuran kinerja pada indikator ini tidak mudah dilakukan karena disamping memerlukan biaya dan waktu yang cukup besar juga kapasitas dan keahlian yang cukup tinggi, sehingga indikator tersebut belum dapat diukur secara internal pada Dinas Perikanan.

Pengukuran indikator tersebut dapat menggunakan data sekunder dari badan/lembaga/organisasi yang memiliki kapasitas dalam melakukan penilaian terhadap kemiskinan rumah tangga pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Tabel 13.

Program, Kegiatan, dan Anggaran yang Menunjang Pencapaian Indikator berkurangnya jumlah rumah tangga miskin pelaku usaha kelautan dan perikanan

N o.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target	Realisasi (%)
<b>Program Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>				
Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				
<b>Sub Kegiatan:</b>				
1.	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	180.919.500	2.000 nelayan	102
<b>Program Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>				
Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil				
<b>Sub Kegiatan:</b>				
1.	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	120.200.000	72 klp	100

### 3.2.4 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4 : “Meningkatnya Daya Beli Masyarakat”

Sasaran Strategis keempat diukur dengan 1 indikator kinerja utama yaitu Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi). Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya (NTP) adalah perbandingan pendapatan nelayan dan pembudidaya terhadap pengeluaran nelayan dan pembudidaya selama satu tahun. Apabila NTP dan NTPi mencapai di atas 100 berarti nelayan dan pembudidaya ikan memperoleh pendapatan lebih besar dari pengeluarannya. Semakin tinggi Nilai Tukar, secara relatif semakin kuat kemampuan daya beli nelayan/pembudidaya tersebut. Oleh sebab itu Nilai Tukar dapat dipergunakan sebagai salah satu indikator dari tingkat kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan.

Pengukuran NTN dan NTPi selama ini belum dapat dilakukan secara internal karena memerlukan biaya yang cukup besar. Pengukuran terhadap NTN dan NTPi masih mengacu kepada data yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 14.  
Pengukuran Capaian pada Indikator Kinerja Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pengukuran
1.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	≥ 103	107.43	104.3 %	Sangat tinggi
2.	Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	Nilai	≥ 103	101.90	98.9 %	Sangat tinggi

Sumber : Rilis Laporan NTN dan NTPi Sulawesi Selatan Tahun 2021, DKP Propinsi Sulawesi Selatan

Tabel 15.  
Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) Tahun 2016 - 2021

Target Indikator dan Capaian Kinerja Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya												
Indikator	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
NTN	na	Na	Na	Na	Na	102	99,64	107,62	102	99,64	103	107,43
NTPi	na	Na	Na	Na	Na	102	96,06	104,13	102	96,06	103	101,90

Berdasarkan tabel diatas, realiasi NTN telah melebihi target sedangkan NTPi tidak mencapai target akan tetapi mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Walaupun telah terjadi peningkatan, masih perlu dilakukan upaya-upaya agar NTN dan NTPi dapat lebih meningkat yakni:

1. Memperkuat sarpras produksi dan pemasaran melalui bantuan hibah kepada kelompok perikanan terutama yang terkena dampak ekonomi akibat covid\_19;
2. Melakukan fasilitasi kepada pelaku usaha sektor perikanan terhadap peningkatan akses pemasaran dan permodalan;
3. Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap nelayan dan pembudidaya ikan pada komoditas yang memiliki nilai pasar dan ekonomis tinggi.

Dalam menunjang pencapaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Daya Beli Masyarakat”, dengan indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) didukung oleh program, kegiatan, dan anggaran pada Dinas Perikanan diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 16.

Program, Kegiatan, dan Anggaran yang Menunjang Pencapaian Indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) Tahun 2021

N o.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target	Realisasi (%)
<b>Program Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>				
Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				
<b>Sub Kegiatan:</b>				
1.	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	68.013.000	100 persil	100
<b>Program Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>				
Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil				
<b>Sub Kegiatan:</b>				
1.	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	95.200.000	39 klp	100

### 3.2.5 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-5 : “Meningkatnya Investasi”

Sasaran Strategis kelima adalah Meningkatkan Investasi diukur dengan 1 indikator kinerja utama yaitu Nilai PDRB Sub sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten. Pada dasarnya

PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi suatu daerah. Sehingga PDRB subsektor kelautan dan perikanan merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi suatu daerah pada subsektor kelautan dan perikanan.

Berikut perbandingan antara target dan realisasi indikator Nilai PDRB subsektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021.



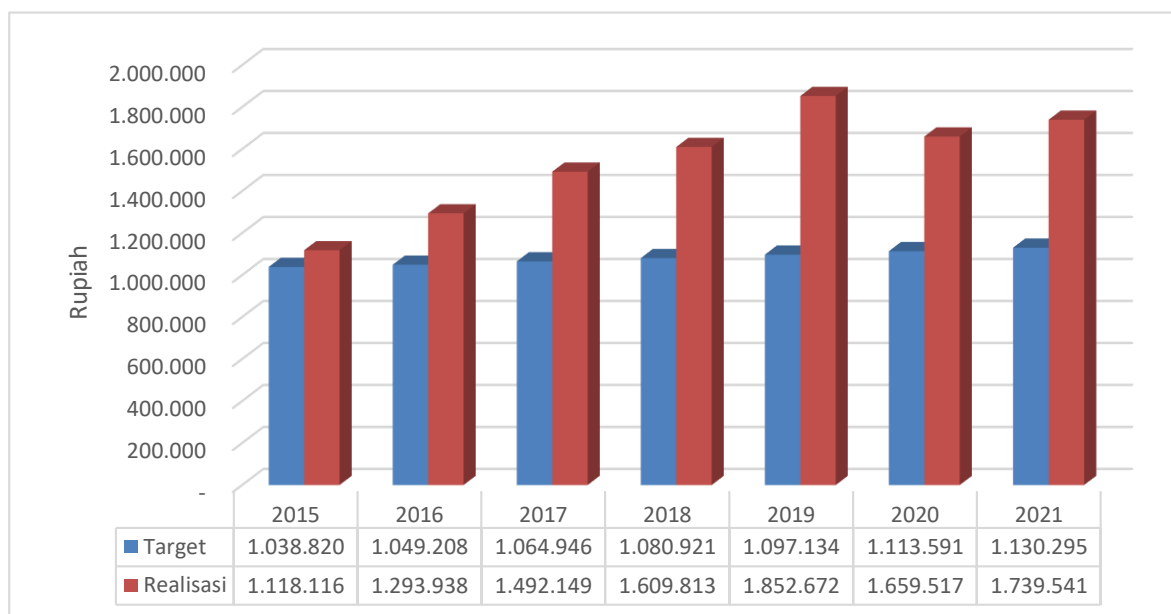
Tabel 17.  
Pengukuran Capaian pada Indikator Kinerja Nilai PDRB Subsektor Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pengukuran
1.	Nilai PDRB Subsektor Perikanan (Rp. 1.000.000)	Nilai Rupiah	1.130.295,3	1.739.540,56	154	Sangat tinggi
Sumber : Rilis Laporan BPS Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021						

Tabel 18.  
Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Indikator Nilai PDRB Subsektor Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 - 2021

Kontribusi Nilai PDRB Subsektor Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar dan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Berdasarkan Harga Berlaku (Rp. 1000.000)							
Uraian	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Kabupaten Kep. Selayar	Na	4.666.086,03	5.223.199,38	5.850.862,50	6.444.224,78	6.392.741,36	6.835.395,93
Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Na	2.161.144,90	2.394.853,48	2.639.245,41	2.879.614,99	2.712.877,07	2.913.584,80
Sub Sektor Perikanan	1.118.116,10	1.293.938,20	1.492.148,70	1.609.813,46	1.852.671,67	1.659.516,80	1.739.540,56

Gambar 3.  
Diagram Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Indikator Nilai PDRB Subsektor Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015- 2021 (Rp. 1000.000)



Tabel 19.  
Perbandingan Persentasi Distribusi PDRB Berdasarkan Harga Berlaku Nilai PDRB Subsektor Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 - 2021

Distribusi PDRB Dasar Harga Berlaku (%)							
Uraian		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A.	Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	46,32	45,85	45,17	44,69	42,44	42,62
A.3	Sub Sektor Perikanan	27,41	27,59	27,48	28,75	25,96	25,45

Dilihat dari uraian tabel PDRB tersebut di atas, maka pencapaian nilai indikator terhadap target PDRB subsektor perikanan dikatakan tercapai dengan nilai 154 %. Nilai kontribusinya terhadap PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sangat tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 42,62 %, dan kontribusi

terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar cukup signifikan setiap tahunnya, dengan nilai rata-rata sebesar 25,45 %.

Pencapaian Nilai PDRB subsektor perikanan sebagai bagian dari indikator makro ekonomi didukung semua program, kegiatan, dan anggaran pada Dinas Perikanan tahun 2021.

Tabel 20.  
Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Dasar Harga Konstan (%)  
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 - 2021

Laju Pertumbuhan PDRB Dasar Harga Konstan (%)							
Uraian		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar		7,35	7,61	8,75	7,68	-1,78	4,02
A.	Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,12	7,23	7,99	7,64	-7,12	3,27
A.3	Sub Sektor Perikanan	10,88	10,39	10,53	13,44	-11,32	3,51

Capaian kinerja PDRB subsektor perikanan tahun 2021 telah melebihi dari target, nilai dan laju pertumbuhan PDRB subsektor perikanan sudah meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya (lihat tabel.20). Laju pertumbuhan PDRB sub sector perikanan mengalami pertumbuhan sebesar 3,51 tahun 2022, hal ini menandakan sudah mulai membaiknya produksi dan nilai produksi perikanan terdampak pandemic covid-19.

Walaupun laju pertumbuhan PDRB sudah mulai membaik, tapi masih perlu dilakukan upaya-upaya agar laju pertumbuhan tersebut lebih meningkat dan stabil dengan menetapkan arah kebijakan dalam perencanaan dan penganggaran yang lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat perikanan melalui kegiatan penguatan sarpras produksi, pengembangan fasilitas pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dan penguatan kapasitas dan pemberdayaan kelompok.

**3.2.6 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-6 : “Terbangun dan Berkembangnya Kawasan Industri Perikanan Terpadu”**

Terbangun dan berkembangnya Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) Kabupaten Kepulauan Selayar adalah salah satu program prioritas Kabupaten Kepulauan Selayar dalam periode RPJMD Tahun 2016 – 2021. Ada 2 (dua) pendekatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, yaitu memaksimalkan pengelolaan kawasan perikanan yang sudah ada seperti PPI/TPI Bonehalang dan sentra-sentra pendaratan perikanan lainnya, serta membentuk Kawasan perikanan baru yang lebih dekat dengan area penangkapan dan dapat mengintegrasikan seluruh aspek industri perikanan mulai penangkapan hingga pengolahan dan distribusi produk yang diharapkan akan memicu efek pengganda ekonomi bagi pelaku usaha perikanan.

Pendekatan memaksimalkan pengelolaan PPI/TPI Bonehalang dan sentra nelayan dilakukan dengan kerjasama pengelolaan sarana yang sudah ada dan melengkapi berbagai kebutuhan pemanfaatan terhadap fasilitas perikanan pada sentra nelayan dan PPI/TPI Bonehalang, misalnya pabrik es, cold storage, UPI, pasar ikan dan sebagainya.

Sedangkan pendekatan pembangunan kawasan perikanan yang baru, dilaksanakan dengan membagi pada 3 (tiga) tahapan, yaitu :

Tabel 21.  
Capaian Kinerja Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT)  
Tahun 2021

No	Uraian Tahapan	Keterangan	Nilai Kriteria
I.	Tahap penyediaan dokumen perencanaan pembangunan KIPT, dengan nilai 40 %		
1.	Dokumen Studi kelayakan lokasi KIPT	Tersedia	10
2.	Penetapan lokasi KIPT	SK Bupati, ada	10
3.	Penyusunan Dokumen Masterplan KIPT.	Tersedia	10
4.	Pembentukan Tim Kerja KIPT	SK Bupati	10
5.	Penyesuaian lokasi terhadap tata ruang wilayah (RZWP3K, RTRW Kabupaten, dan RTRW Propinsi)	Terakomodir dalam 3 regulasi tata ruang	10

## Laporan Akuntalibitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021

	6.	Kerjasama Investasi perikanan dalam Kawasan KIPT	- MoU KKP/Investor - Forum Bisnis	10
	7.	Penguatan kapasitas Aparatur dalam rangka pembangunan KIPT dan pengelolaan Kawasan perikanan.	Studi Banding pengelolaan Kawasan perikanan	10
	8.	Penetapan Lokasi KIPT oleh pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.	Dalam Proses	10
	9.	Dokumen AMDAL KIPT	Tahun 2020	0 (Pemangkasan anggaran covid-19)
	10.	Dokumen Bisnisplan KIPT	Tahun 2020	0 (Pemangkasan anggaran covid-19)
	11.	Penyusunan Profil KIPT	Tahun 2021	Diluncurkan Ke Tahun Berikutnya karena Masa Pelaksanaan Kegiatan tidak cukup
Jumlah Nilai :				80
Pengukuran : $\{80/100\} \times 40 \%$				32 %
II.	Tahap II : Merealisasikan pembebasan lahan KIPT, dengan Nilai 20 %			
1.	Dokumen Pengadaan Tanah KIPT	Tersedia 1 dokumen	50	
2.	Pembebasan Lokasi KIPT Hangkoang secara bertahap sebesar 32 Ha	Dalam proses		(Pemda tidak punya kewenangan dalam pembebasan lahan untuk investasi swasta)
Jumlah Nilai :				50
Pengukuran : $\{50/100\} \times 20 \%$				10 %
III.	Tahap III : Merealisasikan pembangunan infrastruktur, dengan Nilai 40 %			
1.	- Melengkapi Fasilitas Kawasan Perikanan PPI/TPI Bonehalang dan sentra nelayan (Rehabilitasi Cold storage, pengadaan mesin kompresor pabrik es)	- PPI/TPI Bonehalang	5	
	- Melengkapi fasilitasi kawasan perikanan TPI Bonehalang dan sentra nelayan (rehabilitasi pabrik es kayuadi dan pembangunan koridor bongkar muat TPI)		5	
2.	Pembangunan Fasilitas Pokok, Fungsional, dan Penunjang di KIPT Hangkoang	0	0	
Jumlah Nilai :				10
Pengukuran : $\{10/100\} \times 40 \%$				4 %
Sumber : Data Dinas Perikanan Setelah Diolah, Tahun 2021				

Tabel 22.  
Pengukuran Capaian pada Indikator Kinerja Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pengukuran
1.	Realisasi Pembangunan KIPT	%	65	50	77	Tinggi

Sumber : Pengolahan Data Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Tabel 23.  
Perbandingan antara target dan capaian Indikator Realisasi Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) Selama Periode Renstra

Uraian Indikator Kinerja Realisasi Pembangunan KIPT	Periode RENSTRA						
	Awal 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Target (%)	Na	Na	Na	10	55	60	65
Realisasi (%)	Na	Na	Na	15	48	48	48
Capaian (%)	Na	Na	Na	150	87,27	80	73,85

Sumber : Pengolahan Data Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Capaian indikator Kinerja pembangunan kawasan industri perikanan terpadu (KIPT) sampai dengan tahun 2021 sebesar 50 persen atau 77 persen dari target yang telah ditentukan. Capaian ini terdiri dari tahap penyediaan dokumen perencanaan pembangunan KIPT dengan nilai 40 %, tahap merealisasikan pembebasan lahan KIPT dengan Nilai 20 %, dan tahap merealisasikan pembangunan infrastruktur (melengkapi Fasilitas Kawasan Perikanan PPI/TPI Bonehalang dan sentra nelayan) dengan Nilai 40 %, sedangkan realisasi Pembangunan KIPT di sector pembangunan infrastruktur Tahun 2021 hanya 2 %.

Tidak tercapainya target disebabkan seluruh penganggaran KIPT Tahun 2021 yakni :

- a. Keterbatasan wewenang daerah dalam penganggaran menyebabkan lambatnya pencapaian pembangunan KIPT sehingga sentra utama KIPT Hangkoang belum dapat terealisasi secara fisik,

- b. Belum adanya model dan panduan koordinasi antara OPD dalam menjalankan Pembangunan KIPT sebagai Program Strategis Daerah.

Tindak lanjut yang dilakukan adalah :

- a. Merebut kebijakan perencanaan dan anggaran melalui koordinasi yang lebih intens baik pada level Pemda maupun pemerintah di level yang lebih tinggi,.
- b. Menyusun Strategi dan mendorong pembangunan KIPT secara parsial pada daerah penyangga atau sub sentra di beberapa lokasi
- c. Menyusun RAD program KIPT sebagai panduan bersama semua OPD dalam menjalankan KIPT sebagai program strategis daerah.

Program, kegiatan, dan Sub Kegiatan yang mendukung capaian indikator tersebut sebagai berikut:

Tabel 24.

Program, Kegiatan, dan Anggaran yang Menunjang Pencapaian Indikator Realisasi Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target	Realisasi (%)
Program Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu				
Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaran Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				
1.	Pelayanan Penyelenggaran Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	635.792.731	1 dokumen dan 4 kawasan	78,23

**3.2.7 Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-7 :**  
 “Bertambahnya Produksi Beberapa Kali Lipat pada Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan”

Keberhasilan Sasaran strategis ini diukur oleh 5 (5) indikator kinerja yakni 1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap, 2. Cakupan Binaan Kelompok Nelayan, 3. Produksi Olahan Hasil Perikanan, 4. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, dan 5. Konsumsi Ikan. Pengukuran dan analisis capaian masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut.

1. Capaian Indikator ke-1 : Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap adalah jumlah volume produksi perikanan hasil tangkapan yang didaratkan di tempat-tempat pendaratan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Sehingga estimasi produksi perikanan hanya ditujukan pada produksi perikanan yang didaratkan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pengukuran produksi perikanan tangkap dilakukan dengan metode statistik perikanan dengan teknik sampling yakni melakukan perhitungan produksi perikanan melalui desa sampel yang dipilih secara sengaja melalui kerangka survei. Pengumpulan data dilakukan oleh petugas statistik Dinas Perikanan. Jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2021 dan analisa perbandingan antara target dan realisasi capaian berdasarkan indikator kinerja disajikan pada tabel di bawah ini secara berturut-turut.

Tabel 25.

Data Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

No	Uraian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Jumlah
1.	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	1.953,40	4.675,6	8.008,8	6.246	20.883,8
Sumber : Data Statistik Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2021						

Tabel 26.

Pengukuran Capaian pada Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pengukuran
1.	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	36,938.08	20,883.8	56.54	Rendah
Sumber : Data Statistik Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2021						



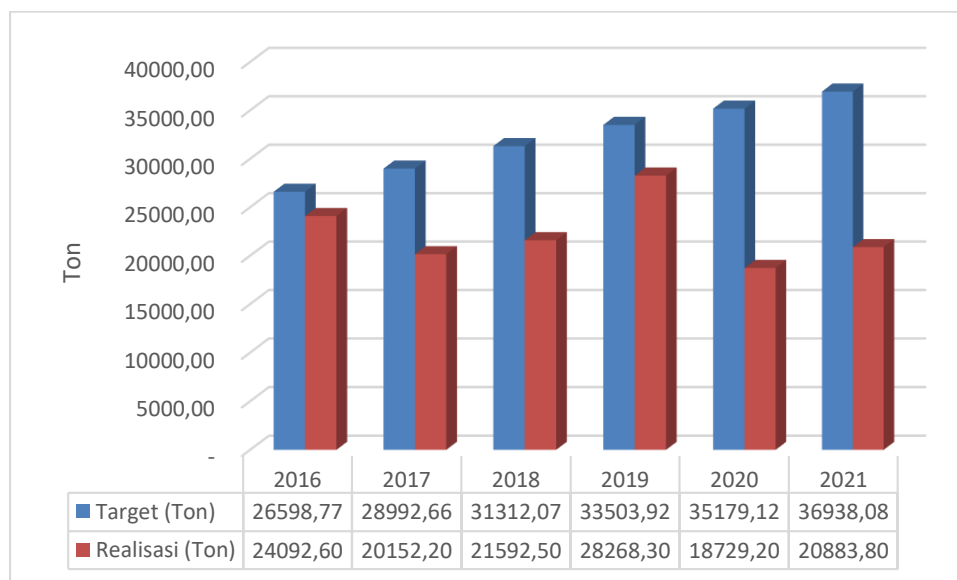
Perbandingan antara target kinerja dan capaian indikator peningkatan produksi perikanan tangkap selama periode Renstra 2016 – 2021, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 27.  
Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Produksi Perikanan Tangkap Dalam Periode RENSTRA

Uraian Indikator Kinerja Produksi Perikanan Tangkap	Periode RENSTRA						
	Awal 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Target (Ton)	24.155,80	26.598,77	28.992,66	31.312,07	33.503,92	35.179,12	36.938,08
Realisasi (Ton)	24.155,80	24.092,60	20.152,20	21.592,50	28.268,30	18.729,2	20.883,8
Capaian (%)	100,00	90,58	69,51	68,96	84,37	53,24	56,54

Sumber : Data Statistik Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2016 – 2021

Gambar 04.  
Diagram Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Produksi Perikanan Tangkap Dalam Periode RENSTRA



Berdasarkan table dan diagram diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan produksi perikanan tangkap jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya akan tetapi tidak mencapai target yang telah ditetapkan tahun 2021, dimana capaian realisasi target produksi tahun 2021 hanya sebesar 56,54 persen.

Tidak tercapainya target karena :

- a. Kondisi pasar hasil perikanan yang masih terdampak pandemic covid 19 yang masih menyebabkan lesunya produksi perikanan tangkap meskipun sudah agak membaik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- b. Tertutupnya pasar ekspor ke beberapa Negara yang dapat memicu penurunan produksi meski harga ikan semakin membaik
- c. Tingginya intensitas penjualan ikan di atas kapal (transshipment) serta banyaknya nelayan luar dengan armada dan alat tangkap yang lebih maju. Permasalahan utama yang menjadi alasan tidak terdaratkannya produksi tangkapan di Selayar, disebabkan oleh :
  - Belum adanya kawasan pendaratan ikan yang mengintegrasikan seluruh bisnis perikanan, sehingga tidak memberikan kepastian harga dan pasar bagi nelayan.
  - Selain kurangnya sarana dan prasarana, beberapa infrastruktur perikanan belum dimanfaatkan dengan baik pada PPI Bonehalang dan sentra-sentra pendaratan ikan lainnya.
  - Belum optimalnya pengembangan kerjasama kelembagaan antara nelayan tangkap dengan pengusaha perikanan di daerah.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi perikanan tangkap adalah :

1. Menciptakan kondisi investasi yang kondusif dan peluang pasar local dan regional yang dapat menampung produksi sehingga dapat mendorong peningkatan hasil tangkapan
2. Pendampingan untuk nelayan, penguatan sarana dan prasarana produksi, fasilitasi akses pasar, dan peningkatan kapasitas nelayan;

3. Penguatan sentra-sentra pendaratan produksi melalui pengadaan berbagai fasilitas kebutuhan nelayan, fasilitas rantai dingin dan mutu hasil tangkapan.

2. Capaian Indikator ke-2 : Cakupan Binaan Kelompok Nelayan

Cakupan binaan kelompok nelayan diukur dari jumlah kelompok nelayan (KUB) yang mendapatkan bantuan sarana dan alat tangkap serta pendampingan/penguatan kapasitas selama tahun 2021. Adapun capaian kinerja pada indikator ini diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 28.  
Perbandingan Antara Target Dan Realisasi pada Indikator Cakupan Binaan Kelompok Nelayan Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pengukuran
1.	Cakupan Binaan Kelompok Nelayan	Jumlah	190	332	175	Sangat tinggi
Sumber : Data dan Informasi Bisang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2021						

3. Capaian Indikator ke-3 : Produksi Olahan Hasil Perikanan

Produksi olahan hasil perikanan tahun 2021 ditargetkan sebesar 135 Ton dan realisasinya sebesar 299,90 ton atau mencapai 222 %. Jika realisasi ini dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, telah terjadi peningkatan sebesar 86%. Adapun capaian kinerja pada indikator produksi olahan hasil perikanan diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 29.  
Target dan Capaian Indikator Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pengukuran
1.	Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	Jumlah	132	299,90	222	Sangat Tinggi
Sumber : Data Statistik Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2021						

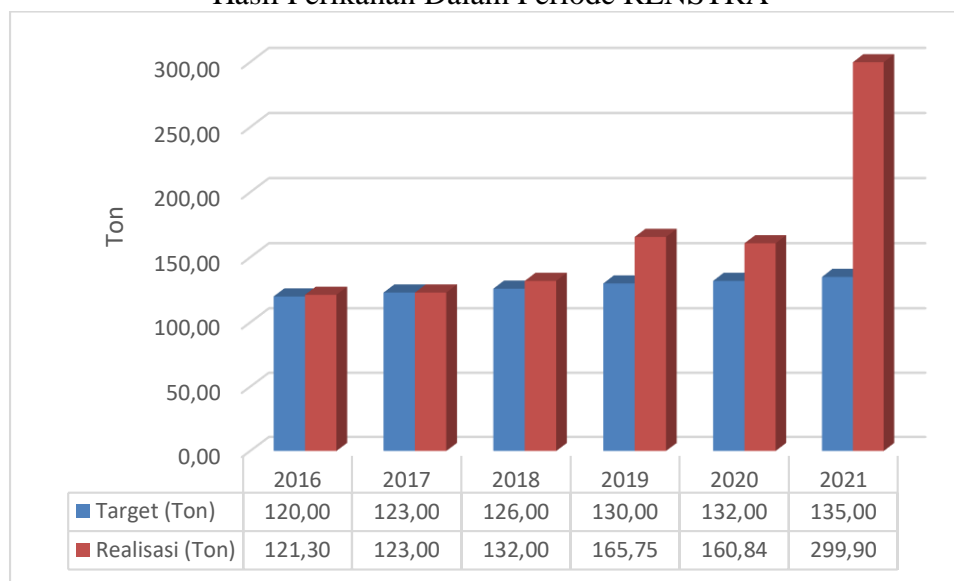
Untuk membandingkan capaian target dan indikator capaian pada Produksi Olahan Hasil Perikanan selama periode Renstra 2016 -2021 diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 30.  
Perbandingan antara Target dan Capaian Indikator Produksi Olahan Hasil Perikanan Dalam Periode RENSTRA

Uraian Indikator Kinerja Produksi Olahan Hasil Perikanan	Periode RENSTRA						
	Tahun Awal 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Target (Ton)	117	120	123	126	130	132	135
Realisasi (Ton)	117	121,3	123	132	165,75	160,84	299,90
Capaian (%)	100.00	101.08	100,00	104,80	127.50	121,84	222
Sumber : Data Statistik Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2016 – 2021							

Tercapaiannya target produksi olahan hasil perikanan tahun 2021 tidak terlepas dari terbukanya peluang pasar dan tersedianya bahan baku sebagai Input dalam proses pengolahan hasil perikanan. Meskipun realisasi mencapai target, masih perlu dilakukan peningkatan standarnisasi mutu produk olahan melalui pendampingan dan pembinaan terhadap usaha-usaha pengolahan serta penyediaan fasilitasi rantai dingin produk perikanan.

Gambar 5.  
Diagram Perbandingan antara Target dan Capaian Indikator Produksi Olahan Hasil Perikanan Dalam Periode RENSTRA



Pencapaian ini didukung oleh program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 31.  
Dukungan Program, Kegiatan, dan Anggaran yang Menunjang Sasaran “Bertambahnya Produksi Beberapa Kali Lipat pada Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan”, dengan 3 (tiga) indikator capaian Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target	Realisasi (%)
I.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap			
1.	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.019.540.870	36.938,08 Ton	56,54
a.	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	3.019.540.870	75 peserta, 658 unit, 10 Paket.	100

#### 4. Capaian Indikator ke-4 : Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Produksi Perikanan Budidaya adalah jumlah volume produksi perikanan budidaya yang dihasilkan oleh pelaku usaha pembudidaya di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, baik produksi budidaya laut (rumput laut dan ikan hidup),

budidaya air tawar (lele), dan budidaya air payau (udang dan bandeng). Jumlah produksi budidaya berdasarkan data triwulan tahun 2021, dan pengukuran capaian indikator kinerja disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 32.

Data Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

No	Uraian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Jumlah
1.	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	134,52	155,27	139,07	93,93	522,79
Sumber : Data Statistik Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2021						

Tabel 33.

Pengukuran Capaian pada Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pengukuran
1.	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Ton	961,13	522,79	54,39	Rendah
Sumber : Data Statistik Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2021						

Realisasi produksi perikanan tahun 2021 sebesar 522,79 ton atau hanya sebesar 54,79 % dari nilai yang ditargetkan dengan predikat rendah. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan sebesar 314,57 ton. Penurunan terbesar adalah dari komoditas rumput laut yaitu sebesar 282,93 ton. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya produksi pada lokasi-lokasi baru seperti Tambolongan, Lantibongan, Lowa, Binanga Sombayya dan Nyiur Indah.

Komoditas kerapu juga mengalami penurunan sebesar 34,72 ton. Penurunan ini disebabkan turunnya animo masyarakat untuk menangkap (membudidaya) akibat sulitnya memasarkan ikan kerapu hidup, bahkan beberapa pengumpul berhenti sementara beroperasi. Dengan adanya dua komoditas yang

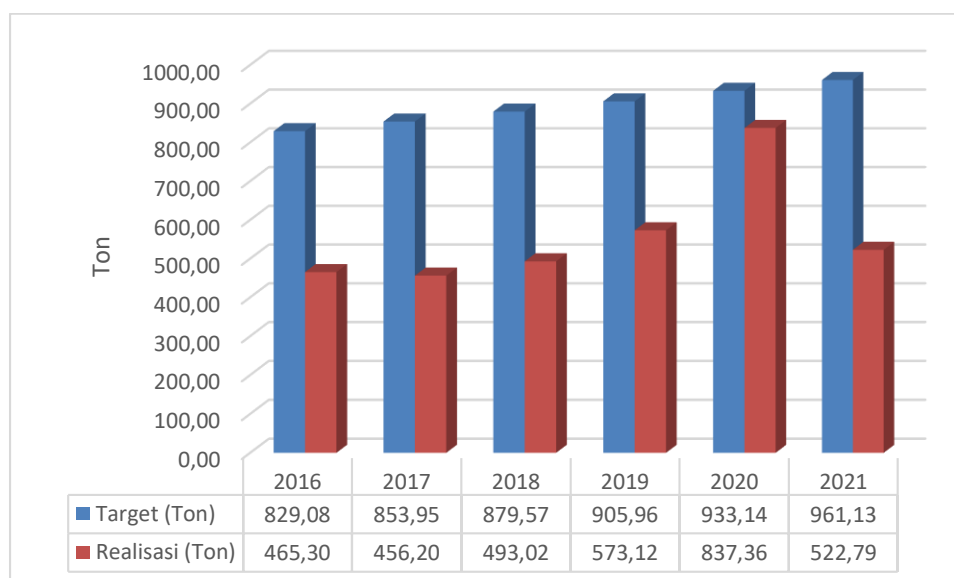
menurun secara drastis maka kenaikan komoditas lain seperti vaname, windu, api-api, ikan kue dan lobster tidak memberikan efek terhadap peningkatan produksi budidaya secara umum.

Tabel 34.  
Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Produksi Perikanan Budidaya Dalam Periode RENSTRA

Uraian Indikator Kinerja Produksi Perikanan Budidaya	Periode RENSTRA						
	Awal 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Target (Ton)	804.93	829.08	853.95	879,57	905,96	933,14	961,13
Realisasi (Ton)	804.93	465,30	456,20	493,02	573,12	837,36	522,79
Capaian (%)	100,00	56,12	53,42	56,05	63,26	89,74	54,39

Sumber : Data Statistik Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2016 – 2021

Gambar 6.  
Diagram Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Produksi Perikanan Budidaya Dalam Periode RENSTRA



Melihat data produksi perikanan budidaya dalam periode renstra dapat di jelaskan bahwa produksi perikanan budidaya sangat dinamis. Ada periode dimana produksi turun secara perlahan kemudian naik lagi secara perlahan, namun tiba-tiba naik secara signifikan dan kemudian turun secara drastis. Dinamisnya produksi tersebut disebabkan produksi komoditas rumput yang sangat dinamis.

Apalagi komoditas rumput laut rata-rata menyumbang 65% hingga 80% dari total hasil budidaya. Dengan demikian, kalau produksi rumput laut jatuh, maka peningkatan komoditas lain tidak akan mampu mendongkrak peningkatan produksi.

Secara umum beberapa faktor penghambat pada pencapaian target indikator pada produksi perikanan budidaya antara lain :

1. Usaha budidaya tambak masih didominasi skala kecil, tradisional, dan subsistem;
2. Tingginya biaya investasi dan operasional (pakan, bibit, perbaikan lahan, saluran air dll) pada usaha perikanan budidaya;
3. Usaha budidaya rumput laut di beberapa lokasi tidak berhasil karena belum mampu mengtaktisi perubahan musim;
5. Pembudidaya rumput laut masih condong menanam jenis yang harganya mahal dipasaran akan tetapi rawan terjadi gagal panen.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya sehingga mencapai target yang telah ditentukan adalah :

1. Memaksimalkan produksi budidaya air payau melalui pengelolaan lahan tambak udang dan bandeng dengan penyediaan sarpras produksi dan bibit, penanganan hama dan penyakit.
2. Memprioritaskan pengembangan usaha budidaya air laut melalui pengembangan komoditas rumput laut dengan penguatan SDM dan penyediaan sarpras.
3. Melakukan sosialisasi kepada pembudidaya untuk dapat melakukan pergantian jenis rumput laut yang akan dikembangkan, khususnya yang jenis yang tahan terhadap perubahan musim.



5. Capaian Indikator ke-5 : Konsumsi Ikan

Pengumpulan dan pengolahan data untuk nilai konsumsi ikan tidak dilakukan secara internal, karena selain biaya dan instrumen, metode pengukuran membutuhkan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan khusus pendataan. Sehingga data konsumsi ikan merupakan data sekunder dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan. Konsumsi ikan merupakan salah satu cara untuk mengetahui tingginya kebutuhan ikan oleh sebuah daerah atau wilayah.

Ketersediaan produk perikanan tangkap yang tinggi dan budaya konsumsi masyarakat terhadap produk ikan, merupakan pendorong tingginya angka konsumsi ikan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun nilai konsumsi ikan tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 35.  
Capaian Indikator Kinerja pada Konsumsi Ikan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pengukuran
1.	Konsumsi Ikan	Kg/Orang/Tahun	53	69,1	130	Sangat tinggi

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

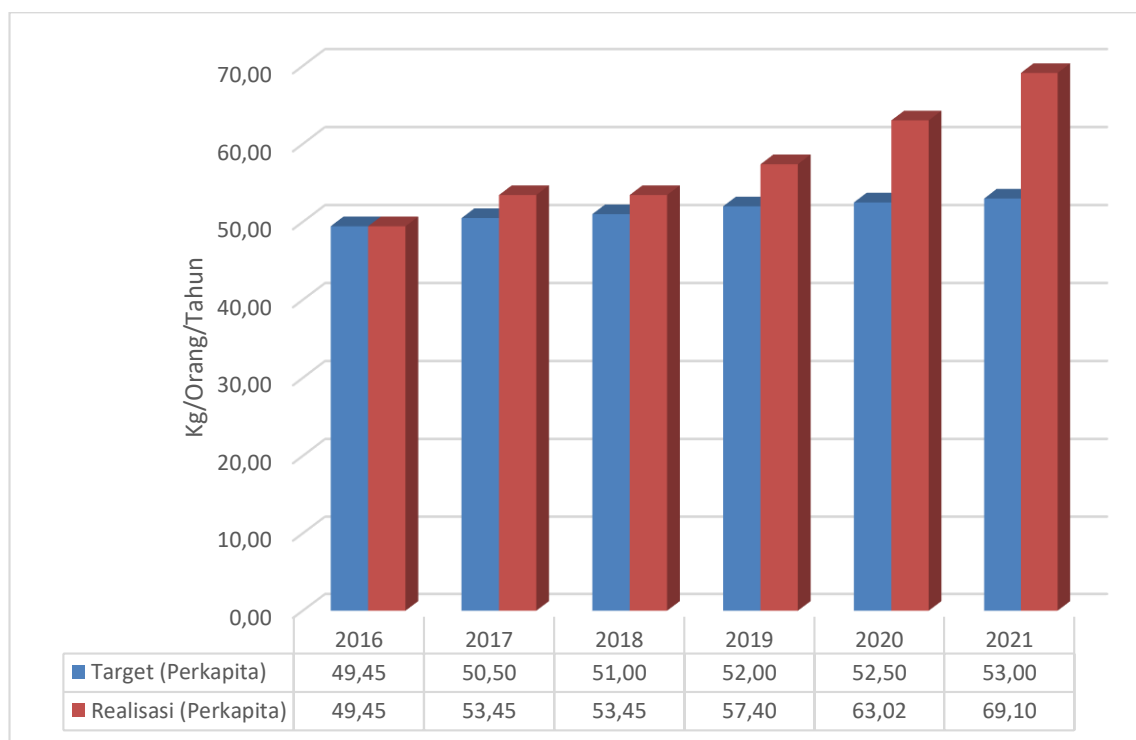
Tabel 36.  
Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Konsumsi Ikan Dalam Periode RENSTRA

Uraian Indikator Kinerja Produksi Perikanan Budidaya	Periode RENSTRA						
	Awal 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Target (Perkapita)	49,45	50,5	51,0	51,5	52,0	52,50	53
Realisasi (Perkapita)	49,45	53,45	53,45	53,45	57,4	63,02	69,1
Capaian (%)	100,00	105.84	104.80	103,79	110.39	120,03	130

*Diolah dari berbagai sumber data*

Gambar 7.

Diagram Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Konsumsi Ikan Dalam Periode RENSTRA



Tabel 37.

Dukungan Program, Kegiatan, dan Anggaran yang Menunjang Capaian Indikator Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dan Konsumsi Ikan Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target	Realisasi (%)
I.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			
a.	Kegiatan Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.010.901.000	961,13 Ton	54,39
1.	<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	108.000.000	9 peta tematik, dan 500 pembudidaya	100
2.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	353.089.000	23 unit jarring sampling, 1 paket sarpras air payau, dan 8 paket sarpras rumput laut	100
3.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	436.301.000	15 unit jarring keramba, 4 unit mesin alkon dan pompa	100
4.	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	113.511.000	1 BBI dan 2 Kawasan	100

### 3.3 Realisasi Keuangan

Salah satu faktor yang mendukung tercapainya indikator dalam capaian kinerja adalah keuangan. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan jika didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan berasal dari anggaran APBD (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam mengimplementasi rencana strategis tahun 2016 - 2021 untuk tahun 2021 dialokasikan Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.613.242.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.311.032.435,- dengan cakupan pelaksanaan 13 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan dalam 4 program. Berikut ini tabel realisasi belanja APBD :

Tabel 38.  
Realisasi Belanja APBD Dinas Perikanan Tahun 2021

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Belanja Tidak Langsung	3.613.242.000	3.550.289.429	98,26
2.	Belanja Langsung	7.311.032.435	6.979.598.280	95,47
<b>Total Belanja</b>		<b>10.924.274.435</b>	<b>10.529.887.709</b>	<b>96,39</b>

Realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program dinas untuk mendukung capaian kinerja dapat dilihat pada tabel 39 berikut :

Tabel 39.  
Realisasi Belanja Langsung Dinas Perikanan  
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	Realisasi (%)
<b>I.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.584.485.334,00</b>	<b>126.775.360,00</b>	<b>97,56</b>
<b>A.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>441.611.200,00</b>	<b>410.071.400,00</b>	<b>92,86</b>
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	159.055.200,00	149.916.200,00	94,25
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.880.000,00	6.540.000,00	95,06
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.740.000,00	5.830.000,00	86,50
4.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6.190.000,00	5.019.900,00	81,10
5.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6.280.000,00	5.230.000,00	83,28
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.070.000,00	5.985.000,00	59,43
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	246.396.000,00	231.550.300,00	93,97
<b>B.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.668.767.000,00</b>	<b>3.605.814.429,00</b>	<b>98,28</b>
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.613.242.000,00	3.550.289.429,00	98,26
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30.525.000,00	30.525.000,00	100
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	100
4.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10.000.000,00	10.000.000,00	100
<b>C.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>218.572.200,00</b>	<b>199.276.200,00</b>	<b>91,17</b>
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	157.750.200,00	140.579.200,00	89,12
2.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	60.822.000,00	58.697.000,00	96,57

Laporan Akuntalibitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021

<b>D.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>332.766.000,00</b>	<b>332.683.500,00</b>	<b>99,98</b>
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	100
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	2.997.500,00	99,92
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.525.000,00	12.525.000,00	100
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.800.000,00	7.720.000,00	98,97
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	307.441.000,00	307.441.000,00	100
<b>E.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>328.978.000,00</b>	<b>326.952.300,00</b>	<b>99,38</b>
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.578.000,00	120.578.000,00	100
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	208.400.000,00	206.374.300,00	99,03
<b>F.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>489.086.581,00</b>	<b>470.443.300,00</b>	<b>96,19</b>
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.995.000,00	7.995.000,00	100
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.674.847,00	114.905.000,00	98,48
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	364.416.734,00	347.543.300,00	95,37
<b>G</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>104.704.353,00</b>	<b>103.164.800,00</b>	<b>98,53</b>
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.630.000,00	38.630.000,00	100
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.550.000,00	43.010.500,00	96,54
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.024.353,00	14.024.300,00	100
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	100

<b>II.</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>3.904.266.101,00</b>	<b>3.696.520.780,00</b>	<b>94,68</b>
<b>A.</b>	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.268.473.370,00</b>	<b>3.212.397.928,00</b>	98,28
1.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	3.019.540.870,00	2.995.154.728,00	99,19
2.	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	180.919.500,00	157.643.200,00	87,13
3.	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	68.013.000,00	59.600.00,00	87,63
<b>B.</b>	<b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>	<b>635.792.731,00</b>	<b>484.122.852,00</b>	<b>76,14</b>
1.	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	635.792.731,00	484.122.852,00	76,14
<b>III.</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>1.226.301.000,00</b>	<b>1.179.089.000,00</b>	<b>96,15</b>
<b>A.</b>	<b>Pemberdayaan Pembudi daya Ikan Kecil</b>	<b>215.400.000,00</b>	<b>171.729.900,00</b>	<b>79,73</b>
1.	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	120.200.000,00	109.709.900,00	91,27
2.	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	95.200.000,00	62.020.000,00	65,15
<b>B.</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>1.010.901.000,00</b>	<b>1.007.359.100,00</b>	<b>99,65</b>
1.	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	108.000.000,00	108.000.000,00	100
2.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	353.089.000,00	352.244.700,00	99,76
3.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	436.301.000,00	433.759.000,00	99,42
4.	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	113.511.000,00	113.355.400,00	99,86

<b>II.</b>	<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>209.222.000,00</b>	<b>205.872.000,00</b>	<b>98,40</b>
<b>A.</b>	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>184.222.000,00</b>	<b>181.322.000,00</b>	<b>98,43</b>
1.	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	184.222.000,00	181.322.000,00	98,43
<b>B.</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>24.550.000,00</b>	<b>98,20</b>
1.	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	24.550.000,00	98,20

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari anggaran belanja langsung Dinas Perikanan tahun 2021 sebesar Rp. 7.311.032.435,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.979.598.280,- atau sebesar 95,47 %.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 belum sepenuhnya berhasil memenuhi target yang telah direncanakan dan diharapkan. Berdasarkan analisis kinerja Tahun 2021, dari 7 sasaran strategis Dinas Perikanan berdasarkan Renstra tahun 2016-2021 dengan 11 indikator kinerja, terdapat 5 (Lima) indikator sasaran yang mencapai mencapai target diatas 100 %, terdapat 4 (Empat) indikator dengan capaian kinerjanya dibawah 100 %, dan terdapat pula 2 (dua) indikator yang belum dilakukan pengukuran karena tidak tersedianya data pengukuran, yaitu 1. skor Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD) dan 2. berkurangnya Jumlah Rumah Tangga Miskin Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.

Kedua indikator sasaran yang belum memiliki data tersebut merupakan indikator makro kabupaten yang ikut ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan sehingga ditetapkan dalam perjanjian kinerja setiap tahunnya. Sulitnya melakukan pengumpulan dan pengukuran pada kedua indikator sasaran tersebut karena dibutuhkan metode, biaya, waktu, dan kapasitas sumberdaya manusia yang cukup memadai.

Pencapaian target beberapa indikator sasaran tahun 2021 tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama pihak-pihak terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan terutama masyarakat sebagai pelaku utama dan subyek pembangunan. Selain faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian, juga terdapat kendala dan tantangan antara lain pada aspek tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Perikanan belum mencakup seluruh aspek kebutuhan pelaku



usaha kelautan dan perikanan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang begitu luas dan tersebar pada 33 pulau. Demikian juga penyusunan dokumen perencanaan (RPJMD, RENSTRA, dan Rencana Kerja Tahunan) belum memiliki keselarasan baik pada program/kegiatan maupun pada indikator sasaran.

#### **4.2 Tindak Lanjut**

LAKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Dinas Perikanan dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berbagai permasalahan atau kendala diupayakan untuk diatasi atau paling tidak dikurangi tingkat pengaruhnya agar tidak menghambat pencapaian sasaran. Upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai target tahun berikutnya adalah :

1. Melakukan peningkatan kapasitas SDM Aparatur melalui berbagai pendidikan dan pelatihan baik dalam perencanaan, penganggaran, pengukuran kinerja, pengukuran kinerja, maupun evaluasi kinerja;
2. Menyusun indicator tujuan dan sasaran yang lebih relevan dan terjangkau berdasarkan tugas dan fungsi OPD pada Renstra Dinas tahun 2021-2025;
3. Memperjelas tujuan, sasaran dan indicator secara SMART pada Renstra Dinas tahun 2021-2025;
4. Menetapkan arah kebijakan yang lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat perikanan;
5. Memperkuat Sarpras produksi dan pemasaran melalui bantuan hibah kepada kelompok perikanan terutama yang terkena dampak ekonomi akibat covid-19;

6. Melakukan fasilitasi kepada pelaku usaha sector perikanan terhadap peningkatan akses pemasaran dan permodalan;
7. Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap nelayan dan pembudidaya ikan pada komoditas yang memiliki nilai pasar dan ekonomis tinggi;
8. Menetapkan arah kebijakan dalam perencanaan dan penganggaran yang lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat perikanan melalui kegiatan penguatan sarpras produksi, pengembangan fasilitas pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dan penguatan kapasitas dan pemberdayaan kelompok;
9. Merebut kebijakan perencanaan & anggaran melalui koordinasi yang lebih intens baik pada level Pemda maupun pemerintah di level yang lebih tinggi.
10. Penyusunan RAD Program KIPT sebagai panduan bersama semua OPD dalam menjalankan Pembangunan KIPT sebagai Program Strategis Daerah;
11. Menyusun Strategi dan mendorong pembangunan KIPT secara parsial pada daerah penyangga atau sub sentra di beberapa lokasi;
12. Pendampingan untuk nelayan untuk penguatan sarana dan prasarana produksi, fasilitasi akses pasar, dan peningkatan kapasitas nelayan;
13. Penguatan sentra-sentra pendaratan produksi melalui pengadaan berbagai fasilitas kebutuhan nelayan, fasilitas rantai dingin dan mutu hasil tangkapan;
14. Memaksimalkan produksi budidaya air payau melalui pengelolaan lahan tambak udang dan bandeng dengan penyediaan sarpras produksi dan bibit, penanganan hama dan penyakit;
15. Memprioritaskan pengembangan usaha budidaya air laut melalui pengembangan komoditas rumput laut dengan penguatan SDM, penyediaan sarpras dan fasilitasi pemasaran;

16. Melakukan sosialisasi kepada pembudidaya untuk dapat melakukan pergantian jenis rumput laut yang akan dikembangkan, khususnya yang jenis yang tahan terhadap perubahan musim;
17. Melakukan pendampingan dan pembinaan standardisasi mutu produk olahan dan penyediaan fasilitas rantai dingin produk perikanan;
18. Mendorong peningkatan konsumsi ikan melalui gerakan Gemar Makan Ikan (Gemarin);
19. Implemetasi panduan prosedur pembentukan dan pendaftaran kelompok pelaku utama perikanan, serta Menyusun target sasaran bina kelompok secara sistematis.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perikanan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun bidang kelautan dan perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, Februari 2021  
**Kepala Dinas**  
  
**Ir. Makkawaru**  
NIP. 19630120 198910 1 003  
Pangkat : Pembina Utama Muda

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N

Lampiran 1.  
Uraian Permasalahan Serta Rencana Tindak Lanjut Pada Capaian Kinerja Sasaran  
Dinas Perikanan Tahun 2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KINERJA TAHUN 2021		URAIAN PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT
				Target	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
Misi II : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik Melalui Pendekatan Aspiratif, Partisipatif, dan Transparan							
1.	Memperkuat Struktur dan Budaya Organisasi Serta Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (T-2)	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Akuntabel (S-2)	1. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	> 70 - 80 (BB)	Nilai LAKIP DKP Tahun 2020 : 56,44 (CC)	Masih lemahnya pemahaman dan penerapan SAKIP pada OPD	Melakukan peningkatan kapasitas SDM Aparatur melalui berbagai pendidikan dan pelatihan baik dalam perencanaan, penganggaran, pengukuran kinerja, maupun evaluasi kinerja

		Meningkatnya Kualitas Pemerintah Daerah yang Efektif dan Efisiensi (S-3)	2. Skor Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPD)	Sangat Tinggi	Sedang	Indikator kinerja sasaran ini cenderung sebagai indikator RPJMD karena mencakup seluruh kinerja OPD, sehingga penetapan indikator sebagai indikator tujuan dan Sasaran OPD kurang relevan dan tidak bisa terjangkau dalam pengukurannya	Akan menyusun indikator tujuan dan sasaran yang lebih relevan dan terjangkau berdasarkan tugas dan fungsi OPD pada Renstra Dinas Tahun 2021-2025.
Misi III : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat							
2.	Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan (T-6)	Menurunnya angka kemiskinan pada rumah tangga masy. pelaku usaha kelautan dan perikanan (S-8)	3. Berkurangnya jumlah Rumah Tangga Miskin pelaku usaha kelautan dan perikanan (Jumlah dan % RTP)	241	na	Indikator Tujuan dan Sasaran tidak berdasarkan pendekatan SMART, sehingga OPD tidak memiliki kapasitas sumberdaya yang memadai (staf dan anggaran) untuk melakukan pengukuran kinerja tersebut, demikian pula instansi lain.	Memperjelas Tujuan, Sasaran dan indikator secara SMART pada Renstra Dinas Tahun 2021-2026. Menetapkan arah kebijakan yang lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat perikanan

	Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan (T-6)	Meningkatnya daya beli masyarakat (S-9)	4.	Nilai Tukar Belayan (NTN)	$\geq 103$	107,43	1. Distribusi Produk Perikanan terhambat akibat daya beli dan daya tampung pasar yang menurun sebagai dampak dari covid_19 dan kebijakan panangannya	Memperkuat sarpras produksi dan pemasaran melalui bantuan hibah kepada kelompok perikanan terutama yang terkena dampak ekonomi akibat covid_19.
			5.	Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)		101,90	2. Terjadinya penurunan harga yang ekstrem di komoditas ikan hidup akibat penutupan ekspor impor selama wabah covid 19	Melakukan fasilitasi kepada pelaku usaha sektor perikanan terhadap peningkatan akses pemasaran dan permodalan
								Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap nelayan dan pembudidaya ikan pada komoditas yang memiliki nilai pasar dan ekonomis tinggi.

Misi IV : Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi Swasta di Sektor Perikanan, Kelautan, dan Pariwisata							
3.	Meningkatkan daya saing dan investasi daerah (T-12)	Meningkatnya investasi (S-19)	6. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB (Rp. Juta)	1.130.295,3	1.739.540,56	Meskipun capaian kinerja PDRB subsektor perikanan tahun 2021 telah melebihi dari target, dan nilai & pertumbuhan PDRB subsektor perikanan sudah mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, masih perlu ditingkatkan.	Menetapkan arah kebijakan dalam perencanaan dan penganggaran yang lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat perikanan melalui kegiatan penguatan sarpras produksi, pengembangan fasilitas pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dan penguatan kapasitas dan pemberdayaan kelompok



Misi V : Mewujudkan Pengelolaan Potensi SDA sesuai Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Daerah							
4.	Meningkatkan posisi tawar dan letak strategis wilayah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kemaritiman (T-13)	Terbangun dan Berkembangnya Kawasan Industri Perikanan Terpadu dan pusat budidaya ikan karang (S-21)	7. Realisasi pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (%)	65	Kinerja Pembangunan KIPT Tahun 2021 : 2 %, sehingga capaian hingga tahun 2021 baru : 50 % dari total target daerah	1. Keterbatasan wewenang daerah dalam penganggaran menyebabkan lambatnya pencapaian pembangunan KIPT sehingga sentra utama KIPT Hangkoang belum dapat terealisasi secara fisik	Merebut kebijakan perencanaan & anggaran melalui koordinasi yang lebih intens baik pada level Pemda maupun pemerintah di level yang lebih tinggi.
						2. Belum adanya model dan panduan koordinasi antara OPD dalam menjalankan Pembangunan KIPT sebagai Program Strategis Daerah	Penyusunan RAD Program KIPT sebagai panduan bersama semua OPD dalam menjalankan Pembangunan KIPT sebagai Program Strategis Daerah

5.	Meningkatkan posisi tawar dan letak strategis wilayah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kemaritiman (T-13)	Bertambahnya produksi beberapa kali lipat pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan (S-23)	8. Perikanan Tangkap (Ton)	36.938,08	20.883,8	Kondisi pasar hasil perikanan yang masih terdampak pandemic covid 19	Pendampingan untuk nelayan untuk penguatan sarana dan prasarana produksi, fasilitasi akses pasar, dan peningkatan kapasitas nelayan
						1. yang menyebabkan masih lesunya produksi perikanan tangkap	
						2. Tertutupnya pasar ekspor ke beberapa Negara yang dapat memicu penurunan produksi meski harga semakin membaik	Menciptakan kondisi investasi yang kondusif dan peluang pasar local dan regional yang dapat menampung produksi sehingga dapat mendorong peningkatan hasil tangkapan
						3. Masih maraknya praktek alih muatan kapal perikanan di tengah laut (transshipment) sehingga hasil produksi ikan tidak terdaratkan di Selayar	Penguatan sentra-sentra pendaratan produksi melalui pengadaan berbagai fasilitas kebutuhan nelayan, fasilitas rantai dingin dan mutu hasil tangkapan

	Meningkatkan posisi tawar dan letak strategis wilayah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kemaritiman (T-13)	Bertambahnya produksi beberapa kali lipat pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan (S-23)	9.	Volume Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	961,13	522,79	1. Menurunnya minat pelaku usaha budidaya air payau akibat mahalanya input investasi (pakan, bibit, perbaikan lahan, saluran air dll) dan menurunnya produktifitas lahan akibat penyakit	Memaksimalkan produksi budidaya air payau melalui pengelolaan lahan tambak udang dan bandeng dengan penyediaan sarpras produksi dan bibit, penanganan hama dan penyakit, serta percontohan pembuatan pakan alami
							2. Belum maksimalnya usaha budidaya air laut akibat berbagai aspek baik internal (etos kerja, budaya, keterampilan dll) maupun faktor eksternal (modal, sarpras, pasar dll)	Memprioritaskan pengembangan usaha budidaya air laut melalui pengembangan komoditas rumput laut dengan penguatan SDM, penyediaan sarpras dan fasilitasi pemasaran

Meningkatkan posisi tawar dan letak strategis wilayah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kemaritiman (T-13)	Bertambahnya produksi beberapa kali lipat pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan (S-23)	10. Volume Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)	135	299,9	Terbukanya peluang pasar dan tersedianya bahan baku sebagai input dalam proses pengolahan hasil perikanan	Melakukan pendampingan dan pembinaan standardisasi mutu produk olahan dan penyediaan fasilitas rantai dingin produk perikanan
		11. Nilai Konsumsi Ikan (Kg/Org/Tahun)	53	69.1	Selain ketersediaan yang cukup, ikan menjadi pilihan utama pemenuhan protein masyarakat Selayar	Mendorong peningkatan konsumsi ikan melalui gerakan Gemar Makan Ikan (GEMARIN)
		12. Jumlah Cakupan bina kelompok nelayan	190	332	Tersedianya input anggaran dan SDM aparatur yang memadai serta pendampingan kelompok yang terlaksana secara maksimal	Implementasi panduan prosedur pembentukan dan pendaftaran kelompok pelaku utama perikanan, serta Menyusun target sasaran bina kelompok secara sistematis



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
DINAS PERIKANAN**

Jl. Ahmad Dahlan Kompleks TPI, 92812, Sulawesi Selatan

**02. Capaian Kinerja Dinas Perikanan  
Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pemerintah Daerah yang Bersih dan Akuntabel	1 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	%	70-80	Nilai LAKIP DKP Tahun 2020 : 56.44	81
2	Meningkatnya Kualitas Pemerintah Daerah yang Efektif dan Efesien	2 Skor Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD)	Skala Predikat	Sangat Tinggi	Sedang	
3	Menurunnya Angka Kemiskinan pada Rumah Tangga Masyarakat Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	3 Berkurangnya Jumlah Rumah Tangga Miskin Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	KK	241	na.	na.
4	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	4 Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Pembudidaya (NTPi)	Skor	≥ 103	NTN = 107.43 NTPi = 101.90	NTN = 104.30 NTPi = 98.93
5	Meningkatnya Investasi	5 Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB	Rp. Juta	1,130,295.30	1,739,540.56	154
6	Terbangun dan Berkembangnya Kawasan Industri Perikanan Terpadu dan Pusat Budidaya Karang	6 Realisasi Pembangunan Sentra Kawasan Industri Perikanan Terpadu	%	65	50	77
7	Bertambahnya Produksi Beberapa Kali Lipat pada Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan	7 Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	36,938.08	20,883.80	57
		8 Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Ton	961.13	522.79	54
		9 Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	135	299.90	222
		10 Konsumsi Ikan	Kg/org/ Tahun	53	69.1	130
		11 Cakupan Binaan Kelompok Nelayan (yang diberi bantuan Tahun 2021)	Klpk	190	332	175

  
 Kepala Dinas,  
  
**Ir. Makkawaru**  
 Pangkat : Pembina Utama Muda  
 NIP : 19630120 198910 1003

**03. RENCANA AKSI DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021**

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM / KEGIATAN				SUB KEGIATAN				RENCANA AKSI	JADWAL SUB KEGIATAN					
		Uraian	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran		TW I	TW II	TW III	TW IV		
																		1	2
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	Memperkuat struktur dan budaya organisasi serta profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (T-2)	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel (S-3)	Skor Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPD)	Sangat Tinggi	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Skor Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPD)</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>1,474,107,134</b>											
					a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	218,572,200	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Dinas yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (jenis pelatihan/bimtek/Diklat/maganng)	22 orang	157,750,200	Meningkatnya pengetahuan SDM Aparatur Dinas		√	√	√		
									Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan mendapatkan informasi tentang Peraturan Per-UU Bidang KP	120 orang	60,822,000	Meningkatkan pengetahuan tentang perundang-undangan			√			
					b. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	332,766,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 Jenis	2,000,000	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			√	√		
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan (sapu,tempat sampah, dll) dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Jenis	3,000,000	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	√	√	√	√		
									Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	8 lembar spanduk	12,525,000	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	√	√	√	√		
																		Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	19010 lembar fotocopy
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	7,800,000	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	√	√	√	√		
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	475 kali	307,441,000	Melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	√	√	√	√		
					c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	13 Unit/Paket	328,978,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	12 unit	120,578,000	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya			√	√		
									Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah toilet kantor yang diadakan	1 Unit	208,400,000	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor			√	√		
																		Jumlah sarana dan prasarana cold stororage dan pabrik es	2 Paket
					d. Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	489,086,581	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	7,995,000	Terpenuhinya jasa surat menyurat	√	√	√	√		
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan komunikasi sumberdaya air dan listrik	3 Tagihan	116,674,847	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	√	√	√	√		
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Tidak Tetap yang dibayarkan asuransi ketenagakerjaan	67 Pegawai	364,416,734	Terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (honor penanggung jawab pengelola keuangan, petugas BMD, honor PHL dan asuransi)			√	√	√	√
						Tersedianya Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT)	24 Pegawai												

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM / KEGIATAN				SUB KEGIATAN				RENCANA AKSI	JADWAL SUB KEGIATAN								
		Uraian	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran		TW I	TW II	TW III	TW IV					
																		1	2	3	4	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
					e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	104,704,353	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas yang dipelihara rutin	1 Unit	38,630,000	Tertibnya pajak dan terpeliharanya secara rutin/berkala kendaraan dinas jabatan	√	√	√	√					
												Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara rutin	36 Unit	44,550,000	Tertibnya pajak dan terpeliharanya secara rutin/berkala kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	√	√	√	√		
												Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin	22 Unit	14,024,353	Melaksanakan pemeliharaan peralatan gedung kantor	√	√	√	√		
												Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	1 Unit	7,500,000	Melaksanakan pemeliharaan gedung kantor					√	
			Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	70-80	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	BB	4,110,378,200														
			a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	17 Dokumen	441,611,200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan perangkat daerah (musrembang Desa/Kec/Propinsi/Pusat dan Perencanaan DAK/APBN/APBD Propinsi)	3 dokumen, 75 peserta	159,055,200	Melakukan Koordinasi/pertemuan sinkronisasi program/kegiatan	√	√	√	√					
														Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang dihasilkan	1 Dokumen	6,880,000	Koordinasi dan penyusunan RKA SKPD		√	√	√
														Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang dihasilkan	1 Dokumen	6,740,000	Koordinasi dan penyusunan Perubahan RKA SKPD			√	√
														Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang dihasilkan	1 Dokumen	6,190,000	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD			√	√
														Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA yang dihasilkan	1 Dokumen	6,280,000	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD				√
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD yang tersedia	3 Dokumen	10,070,000	Mengumpulkan data kinerja, dan Menyusun LAKIP, LPPD, LKPFJ	√	√		
														Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Secara rutin/berkala(RFK APBD/DAK, Monev, dan Statistik	8 Dokumen	246,396,000	Melakukan Monitoring dan evaluasi kinerja program dan kegiatan	√	√	√	√

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM / KEGIATAN				SUB KEGIATAN				RENCANA AKSI	JADWAL SUB KEGIATAN																											
		Uraian	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran		TW I	TW II	TW III	TW IV																								
																		1	2	3	4																				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																											
					b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pelaksanaan administrasi keuangan	4 Laporan	3,668,767,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	46 orang	3,613,242,000	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	√	√	√	√																								
									Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya penunjang administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun	30,525,000.00	Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelaksanaan tugas ASN	√	√	√	√																								
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disediakan	1 Laporan	15,000,000.00	Mengumpulkan data keuangan dan Menyusun Laporan Keuangan	√	√	√	√																								
									Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya bahan dan dokumen tanggapan hasil pemeriksaan	1 Laporan	10,000,000.00	Penyelesaian hasil rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional			√	√																								
2	Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan (T-6)	Menurunnya Angka Kemiskinan Pada Masyarakat Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (S-8)	Berkurangnya jumlah Rumah Tangga Miskin pelaku usaha kelautan dan perikanan (KK)	241	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	36.938,08 Ton	180,919,500																																	
																					a. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	30%	180,919,500	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah nelayan yang terfasilitasi dalam penerbitan KUSUKA	2000 nelayan	180,919,500	Pendataan KUSUKA dan verifikasi kelompok penerima bantuan tahun berikutnya	√	√	√	√								
																										Tersedianya biaya operasional pada bidang pemberdayaan nelayan kecil dan perikanan tangkap (verifikasi)	12 kegiatan														
																					a. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Terlaksananya kegiatan pembinaan kelompok pembudidaya dan fasilitas kelembagaan budidaya berbadan hukum dan terlaksananya kegiatan pendampingan provinsi bidang PUKPI dan pendampingan budidaya air tawar, air laut dan air	72 klp	120,200,000	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mendapatkan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	72 klp	120,200,000	Pembinaan kelembagaan, Fasilitas Pembuatan Akta Notaris, Pembuatan Pupuk Cair Rumput Laut (Pemanfaatan Limbah Rumput Laut	√	√	√	√								
3	Meningkatkan posisi tawar dan letak strategis wilayah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kemaritiman (T-21)	Terbangun dan Berkembangnya Kawasan Industri Perikanan Terpadu dan Pusat Budidaya Ikan Karang (S-13)	Realisasi pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (%)	65%	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	36.938,08 Ton	635,792,731																																	
																						a. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase ketersediaan sarana pelayanan (TPI, dan Sentra Nelayan)	65%	635,792,731	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah dokumen profil KIPT	1 Dokumen	635,792,731.00	- Survei, pengumpulan datadan penyusunan profil KIPT - Identifikasi dan pembangunan sarana/prasarana penunjang pada sentra nelayan	√	√	√	√							
																											Jumlah kawasan perikanan (TPI, dan Sentra Nelayan)	4 Kawasan													



No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM / KEGIATAN				SUB KEGIATAN				RENCANA AKSI	JADWAL SUB KEGIATAN					
		Uraian	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran		TW I	TW II	TW III	TW IV		
																		1	2
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
4	Meningkatkan daya saing dan investasi daerah (T-12)	Meningkatnya Investasi (S-19)	Kontribusi Sektor Kelautan dan perikanan terhadap PDRB (Rp)	1.130.295,30 Rp. Juta	<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>Kontribusi Sektor Kelautan dan perikanan terhadap PDRB (Rp)</b>	1.130.295,30 Rp. Juta	<b>209,222,000</b>											
					a.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya kegiatan lomba masak serba ikan, bimtekusaha pengembangan usaha pengolahan hasil budidaya dan bimtek penanganan hasil budidaya	60 Orang	184,222,000	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Stnadar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pengolah/Pemasar Hasil Perikanan yang Mengikuti Bimbingan Persyaratan Atau Standar Pengolahan Hasil Ikan	60 Orang	184,222,000	- Melaksanakan bimbingan terkait persyaratan atau standar pengolahan hasil perikanan			√	√	√
					b.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi gemar makan ikan	80 orang	25,000,000	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi gemar makan ikan	80 orang	25,000,000	Melaksanakan sosialisasi gemar makan ikan					√
	Bertambahnya Produksi Beberapa Kali Lipat pada Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan (S-23)	1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	36.938,08 Ton		<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (Ton)</b>	<b>36.938,08 Ton</b>	<b>3,019,540,870</b>											
		2. Jumlah Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)	135																
		3. Cakupan bina kelompok nelayan	190		a.	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap</b>	<b>30%</b>	<b>3,019,540,870</b>	<b>Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil</b>	Jumlah Nelayan Kecil Mendapatkan Pengembangan kapasitas nelayan kecil berupa Bimtek dan pelatihan	75 peserta							
											Jumlah Nelayan Kecil Mendapatkan Peningkatan Kapasitas (bantuan sarana/prasarana berupa alat tangkap jaring, mesin, perahu/sampan fiber, fish finder, bubu)	579 unit							
											Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil berupa Alat Penangkapan Ikan Ramah lingkungan (Jaring) (DAK)	10 paket	3,019,540,870	Penyusunan RUP, proses pengadaan dan penyaluran bantuan	√	√	√	√	
											Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil berupa perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan laut berukuran lebih kecil dari 5 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan dan sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan (DAK)	21 unit							
											Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil berupa Sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan (Cold Box) (DAK)	58 unit							

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM / KEGIATAN				SUB KEGIATAN				RENCANA AKSI	JADWAL SUB KEGIATAN				
		Uraian	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran		15	TW	TW	TW	TW
															I	II	III	IV
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	961,13 Ton	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (Ton)</b>	<b>961,13 Ton</b>	<b>1,010,901,000</b>										
			Konsumsi Ikan (Kg/Org/Tahun)	53 (Kg/Org/Tahun)	a. Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya pengelolaan pembudidayaan ikan	100%	1,010,901,000	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	9 peta tematik dan 500 orang pembudidaya	108,000,000	Melakukan pengumpulan, pengolahan, validasi data dan informasi pembudidaya ikan		√	√	√	
									Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jaring sampling yang disediakan dan tersalur	23 unit	353,089,000	Penyusunan RUP, proses pengadaan dan penyaluran bantuan					
									Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana rumput laut	8 paket	1 paket				√	√	√	√
									Jumlah sarana dan prasarana budidaya air payau (DAK)	1 paket								
									Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Pembudidayaan Ikan (Jaring) yang disediakan	15 unit	436,301,000	Penyusunan RUP, proses pengadaan dan penyaluran bantuan					
									Jumlah sarana Pembudidayaan Ikan (Alkon dan Pompa) yang disediakan	4 unit				√	√	√	√	
									Terlaksananya Pembangunan / Rehabilitasi Sarpras Unit Pembenihan Rakyat (UPR) (DAK)	1 paket								
									Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa /Kawasan yang mendapatkan penanganan (kontrol) hama dan penyakit Ikan	2 kawasan	113,511,000	Melakukan pengelolaan benih udang dan sosialisasi pemeriksaan hama dan penyakit ikan/udang	√	√	√	√	
<b>TOTAL</b>												<b>10,924,274,435</b>						

  
 Kepala Dinas,  
  
**Ir. Makkawaru**  
 Pangkat : Pembina Utama Muda  
 NIP : 19630120 198910 1003

**04. EVALUASI RENCANA AKSI DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021**

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN						Nama PPTK	Faktor Pendukung / Penghambat
		Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			
							Uraian	Target	Capaian (Nilai dan %)	Pagu	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Memperkuat struktur dan budaya organisasi serta profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (T-2)	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel (S-3)	Skor Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPD)	Sangat Tinggi	Sedang	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Skor Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPD)</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sedang</b>	<b>1,474,107,134</b>	<b>1,432,520,100</b>		
						<b>a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan (100%)</b>	<b>218,572,200</b>	<b>199,276,200</b>		
						1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Dinas yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (jenis pelatihan/bimtek/Diklat/magang)	22 orang	23 orang (105%)	157,750,200.00	140,579,200	Suleman, S.E	
						2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan mendapatkan informasi tentang Peraturan Per-UU Bidang KP	120 orang	120 orang (100%)	60,822,000.00	58,697,000	Muh. Amran, S.TP	
						<b>b. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan (100%)</b>	<b>332,766,000</b>	<b>332,683,500</b>		
						1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 Jenis	8 jenis (100%)	2,000,000	2,000,000	Rukaya, S.Pi	
						2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan (sapu,tempat sampah, dll) dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Jenis	3 jenis (100%)	3,000,000	2,997,500	Rukaya, S.Pi	
						3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	8 lembar spanduk	8 lembar spanduk	12,525,000	12,525,000	Rukaya, S.Pi	
							Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	19010 lembar fotocopy	19010 lembar fotocopy				
						4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan (100%)	7,800,000	7,720,000	Rukaya, S.Pi	
						5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	12 Bulan (100%)	307,441,000	307,441,000	Rukaya, S.Pi	
						<b>c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan</b>	<b>13 Unit</b>	<b>13 unit (100%)</b>	<b>328,978,000</b>	<b>326,952,300</b>		
						1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	12 unit	12 unit (100%)	120,578,000	120,578,000	Suleman, S.E	
						2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah toilet kantor yang diadakan	1 Unit	1 Unit (100%)	208,400,000	206,374,300	Rukaya, S.Pi	
							parkir gedung kantor	1 Paket	1 Paket (100%)				
							Jumlah sarana dan prasarana cold storage dan pabrik es	2 Paket	2 Paket (100%)				
						<b>d. Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan (100%)</b>	<b>489,086,581</b>	<b>470,443,300</b>		
						1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan (100%)	7,995,000	7,995,000	Rukaya, S.Pi	
						2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan komunikasi sumberdaya air dan listrik	3 Tagihan	3 tagihan (100%)	116,674,847	114,905,000	Rukaya, S.Pi	
						3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Tidak Tetap yang dibayarkan asuransi ketenagakerjaan	67 Pegawai	70 PHL (104%)	364,416,734	347,543,300	Rukaya, S.Pi	
							Tersedianya honorarium jasa pelayanan umum kantor (KPA, Penatausaha Keuangan, Pengelola BMD,Bendahara, Pengurus dan Pembantu Pengurus Barang)	13 Pegawai	13 Pegawai (100%)				
							Tersedianya Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT)	24 Pegawai	24 Pegawai (100%)				

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN						Nama PPTK	Faktor Pendukung / Penghambat
		Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			
							Uraian	Target	Capaian (Nilai dan %)	Pagu	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						e. <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan (100%)</b>	<b>104,704,353</b>	<b>103,164,800</b>		
						1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas yang dipelihara rutin	1 Unit	1 Unit (100%)	38,630,000	38,630,000	Rukaya, S.Pi	
						2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara rutin	36 Unit	31 unit (86%)	44,550,000	43,010,500	Rukaya, S.Pi	
						3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin	22 Unit	23 unit	14,024,353	14,024,300	Rukaya, S.Pi	
						4 Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	1 Unit	1 Unit (100%)	7,500,000	7,500,000.00	Rukaya, S.Pi	
		Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah		70-80	56.44	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah</b>	<b>BB</b>	<b>CC</b>	<b>4,110,378,200</b>	<b>4,015,885,829</b>		
						a. <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>17 Dokumen</b>	<b>17 dokumen (100%)</b>	<b>441,611,200</b>	<b>410,071,400</b>		
						1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan perangkat daerah (musrebang Desa/Kec/Propinsi/Pusat dan Perencanaan DAK/APBN/APBD Propinsi	3 dokumen, 75 peserta	3 dokumen, 75 peserta (100%)	159,055,200	149,916,200.00	Muh. Amran, S.TP	
						2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen (100%)	6,880,000	6,540,000.00	Muh. Amran, S.TP	
						3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen (100%)	6,740,000	5,830,000.00	Muh. Amran, S.TP	
						4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen (100%)	6,190,000	5,019,900.00	Muh. Amran, S.TP	
						5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen (100%)	6,280,000	5,230,000.00	Muh. Amran, S.TP	
						6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD yang tersedia	3 Dokumen	3 Dokumen (100%)	10,070,000	5,985,000.00	Muh. Amran, S.TP	
						7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Secara rutin/berkala(RFK APBD/DAK, Monev, dan Statistik	8 Dokumen	8 Dokumen (100%)	246,396,000	231,550,300.00	Muh. Amran, S.TP	
						b. <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya pelaksanaan administrasi keuangan</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>4 Laporan (100%)</b>	<b>3,668,767,000</b>	<b>3,605,814,429</b>		
						1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan (100%)	3,613,242,000	3,550,289,429	Suleman, S.E	
						2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya penunjang administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun	1 Tahun (100%)	30,525,000.00	30,525,000	Rukaya, S.Pi	
						3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan (100%)	15,000,000.00	15,000,000	Suleman, S.E	
						4 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya bahan dan dokumen tanggapan hasil pemeriksaan	1 Laporan	1 Laporan (100%)	10,000,000.00	10,000,000	Suleman, S.E	

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN						Nama PPTK	Faktor Pendukung / Penghambat
		Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			
							Uraian	Target	Capaian (Nilai dan %)	Pagu	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan (T-6)	Menurunnya Angka Kemiskinan Pada Masyarakat Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (S-8)	Berkurangnya jumlah Rumah Tangga Miskin pelaku usaha kelautan dan perikanan (KK)	241	na	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (Ton)</b>	<b>36.938,08 Ton</b>	<b>20.883,8 Ton</b>	<b>180,919,500</b>	<b>157,643,200</b>		
						a. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	30%	30%	180,919,500	157,643,200		
						1. Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah nelayan yang terfasilitasi dalam penerbitan KUSUKA	2000 nelayan	2041 nelayan (102%)	180,919,500	157,643,200	Alfrida Febrianti, S.Pi	Sisa perjalanan dinas (Biaya penginapan untuk kepulauan karena yang terpakai Cuma 30 persen)
						Tersedianya biaya operasional pada bidang pemberdayaan nelayan kecil dan perikanan tangkap (verifikasi)	12 kegiatan	12 kegiatan (100%)					
						<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (Ton)</b>	<b>961,13 Ton</b>	<b>522,79 Ton</b>	<b>120,200,000</b>	<b>109,709,900</b>		
						a. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Terlaksananya kegiatan pembinaan kelompok pembudidaya dan fasilitas kelembagaan budidaya berbadan hukum dan terlaksananya kegiatan pendampingan provinsi bidang PUKPI dan pendampingan budidaya air tawar, air laut dan air payau	72 klp	72 klp (100%)	120,200,000	109,709,900		
						1. Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mendapatkan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	72 klp	72 klp (100%)	120,200,000	109,709,900	Ridwan, S.Kel	Kurangnya kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga sering berbeda laporan aplikasi dan catatan manual
		Meningkatnya Daya Beli Masyarakat (S-9)	Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya (NTPI)	≥103	NTN : 107,43 NTPH : 101,90	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (Ton)</b>	<b>36.938,08 Ton</b>	<b>20.883,8 Ton</b>	68,013,000	59,600,000		
						a. <b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	30%	30%	<b>68,013,000</b>	<b>59,600,000</b>		
						1. Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Nelayan yang Terfasilitasi Terhadap Akses Pendanaan, Pembiayaan, dan Kemitraan Usaha	100 persil	100 persil	68,013,000	59,600,000	Alfrida Febrianti, S.Pi	Sisa perjalanan dinas luar daerah
						<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (Ton)</b>	<b>961,13 Ton</b>	<b>522,79 Ton</b>	<b>95,200,000</b>	<b>62,020,000</b>		
						a. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Terlaksananya kegiatan pembinaan kelompok pembudidaya dan fasilitas kelembagaan budidaya berbadan hukum dan terlaksananya kegiatan pendampingan provinsi bidang PUKPI dan pendampingan budidaya air tawar, air laut dan air payau	72 klp	72 klp	95,200,000	62,020,000		
						1. Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Pembudidaya yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, dan Kemitraan Usaha	36 klp	36 klp	95,200,000	62,020,000	Ridwan, S.Kel	Kurangnya kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga sering berbeda laporan aplikasi dan catatan manual
3	Meningkatkan posisi tawar dan letak strategis wilayah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kemaritiman (T-13)	Terbangun dan Berkembangnya Kawasan Industri Perikanan Terpadu dan Pusat Budidaya Ikan Karang (S-21)	Realisasi pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (%)	60%	50%	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (Ton)</b>	<b>36.938,08 Ton</b>	<b>20.883,8 Ton</b>	<b>635,792,731</b>	<b>484,122,852</b>		
						a. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase ketersediaan sarana pelayanan (TPI, dan Sentra Nelayan)	65%	50%	635,792,731.00	484,122,852		
						1. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah dokumen profil KIPT	1 Dokumen	0	635,792,731	484,122,852	Mustafa, S.Kel	- Masa pelaksanaan kegiatan tidak cukup (penyusunan profil KIPT) sehingga diturunkan ke tahun berikutnya
						Jumlah kawasan perikanan (TPI, dan Sentra Nelayan)	4 Kawasan	2 kawasan	- sisa anggaran kontrak tender				

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN						Nama PPTK	Faktor Pendukung / Penghambat	
		Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran				
							Uraian	Target	Capaian (Nilai dan %)	Pagu	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Meningkatkan daya saing dan investasi daerah (T-12)	Meningkatnya Investasi (S-19)	Kontribusi Sektor Kelautan dan perikanan terhadap PDRB (Rp)			<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>	<b>Kontribusi Sektor Kelautan dan perikanan terhadap PDRB (Rp)</b>	<b>1.130.295,30 Rp. Juta</b>	<b>1.739.540,56 Rp. Juta</b>	<b>209,222,000</b>	<b>205,872,000</b>			
				1.130.295,30 Rp. Juta	1.739.540,56 Rp. Juta	a.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya kegiatan lomba masak serba ikan, bimtekusaha pengembangan usaha pengolahan hasil budidaya dan bimtek penanganan hasil budidaya	60 Orang	60 orang	184,222,000	181,322,000		
						1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Sntadar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pengolah/Pemasar Hasil Perikanan yang Mengikuti Bimbingan Persyaratan Atau Standar Pengolahan Hasil Ikan	60 Orang	60 Orang	184,222,000	181,322,000		
								Terlaksananya lomba masak serba ikan	3 kali	3 kali				
						b.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi gemar makan ikan	80 orang	80 orang	25,000,000	24,550,000		
						1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi gemar makan ikan	80 orang	60 Orang	25,000,000	24,550,000		Honor Pemateri hanya dibayarkan 50% dari Rp. 900.000,- sesuai permendagri 77 tahun 2020
5	Bertambahnya Produksi Beberapa Kali Lipat pada Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan (S-23)	1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (Ton)		36.938,08 Ton	20.883,8 Ton	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (Ton)</b>	<b>36.938,08 Ton</b>	<b>20.883,8 Ton</b>	<b>3,019,540,870</b>	<b>2,995,154,728</b>			
		2. Jumlah Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)		135	327,43 Ton	a.	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	30%	30%	3,019,540,870	2,995,154,728		
		3. Cakupan bina kelompok nelayan		190	332	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil Mendapatkan Pengembangan kapasitas nelayan kecil berupa Bimtek dan pelatihan	75 peserta	75 peserta				
								Jumlah Nelayan Kecil Mendapatkan Peningkatan Kapasitas (bantuan sarana/prasarana berupa alat tangkap jaring, mesin, perahu/sampan fiber, fish finder, bubu)	579 unit	579 unit				
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil berupa Alat Penangkapan Ikan Ramah lingkungan (Jaring) (DAK)	10 paket	10 paket				
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil berupa perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan laut berukuran lebih kecil dari 5 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan dan sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan (DAK)	21 unit	21 unit	3,019,540,870	2,995,154,728	Herawati, S.Pi	Sisa tender kegiatan perubahan, narasumber menggunakan pejabat dalam OPD (Kepala Dinas), perjalanan dinas pada kegiatan Bimtek Penanganan Hasil tangkapan ikan di atas kapal (untuk Narasumber dari luar)
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil berupa Sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan (Cold Box) (DAK)	58 unit	58 unit				

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN						Nama PPTK	Faktor Pendukung / Penghambat	
		Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran				
							Uraian	Target	Capaian (Nilai dan %)	Pagu	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Peningkatan Produksi Perikanan	961,13 Ton	522,79 Ton	a.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya pengelolaan pembudidayaan ikan	100%	100%	1,010,901,000	1,007,359,100		
			Konsumsi Ikan (Kg/Org/Tahun)	53 (Kg/Org/Tahun)	69,1 (Kg/Org/Tahun)		1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	9 peta tematik dan 500 orang pembudidaya	9 peta tematik dan 500 orang pembudidaya	108,000,000	108,000,000	Ridwan, S.Kel
							2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jaring sampling yang disediakan dan tersalur	23 unit	23 unit (100%)	353,089,000	352,244,700	Syamsuryani, S.Pi, M.Si
								Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana rumput laut	8 paket	8 paket (100%)				
								Jumlah sarana dan prasarana budidaya air payau (DAK)	1 paket	1 paket (100%)				
							3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Pembudidayaan Ikan (Jaring) yang disediakan	15 unit	15 unit (100%)	436,301,000	433,759,000	Syamsuryani, S.Pi, M.Si
								Jumlah sarana Pembudidayaan Ikan (Alkon dan Pompa) yang disediakan	4 unit	4 unit (100%)				
								Terlaksananya Pembangunan / Rehabilitasi Sarpras Unit Pembenihan Rakyat (UPR) (DAK)	1 paket	1 paket (100%)				
							4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa /Kawasan yang mendapatkan penanganan (kontrol) hama dan penyakit ikan	2 kawasan	2 Kawasan (100%)	113,511,000	113,355,400	Ihsan Abdul Kadir, S.Pi
<b>TOTAL</b>											<b>10,924,274,435</b>	<b>10,529,887,709</b>		

  
 Kepala Dinas.  
  
**Ir. Makkawaru**  
 Pangkat : Pembina Utama Muda  
 NIP : 19630120 198910 1003